

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN WISATA**

**SUMUR PANJANG DI KECAMATAN BONTOTIRO**

**KABUPATEN BULUKUMBA**

**A. ZULKIPLI SUDROS**

**Nomor Stambuk : 10564 0184 713**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan  
Wisata Sumur Panjang Di Kecamatan Bontotiro  
Kabupaten Bulukumba

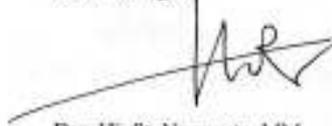
Nama Mahasiswa : A. Zulkipli Sudros

Nomor Stambuk : 105 640 184713

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

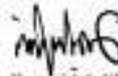
**Menyetujui:**

Pembimbing I



Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM

Pembimbing II



Dr. Hj. Iryani Malik, S.Sos, M. Si

**Mengetahui:**



Dr. Hj. Iryani Malik, S.Sos, M. Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan,



Dr. Nurfitri M. Jari, S-IP, M. Si

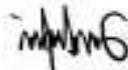
### PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 1219/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program Studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 11 agustus 2018.

### TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

### PENGUJI

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si
2. Dra. Hj. Musliha Karim, M.Si
3. Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM
4. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



### PERNYATAAN KEASLIAN KARVA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : A. Zulkipli Sudros

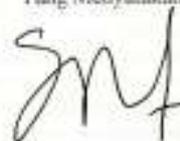
Nomor Satribuk : 105 640 184 713

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 14 September 2018

Yang Menyatakan,



A. Zulkipli Sudros

## ABSTRAK

### **A.ZULKIPLI SUDROS, 2018 Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Sumur Panjang di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.**

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengembangan wisata agar objek wisata tersebut dapat berjalan dengan baik dan banyak diminati oleh pengunjung, termasuk wisata sumur panjang. Keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata tersebut bukan hanya keterlibatan mental semata, tetapi harus disertai dengan keterlibatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.

Jenis penelitian adalah kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologis dengan informan 6 orang, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, dan data sekunder, teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan FGD (Focus Group Discussion) yang dilakukan secara langsung oleh peneliti, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data, dan verifikasi dan pengabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata Sumur Panjang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, baik dalam tahap perencanaan, Partisipasi masyarakat dalam tahap pengelolaan terlihat dari keikutsertaan mereka dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pengelolalaanya, keikutsertaan mereka dalam memberikan pelayanan bagi wisatawan dan keikutsertaan dalam mempromosikan obyek wisata. Manfaat partisipasi yang dirasakan masyarakat dalam pengembangan wisata Sumur Panjang adalah ekonomi masyarakat Kecamatan Bontotiro menjadi meningkat, lingkungan dan obyek wisata Sumur Panjang menjadi lebih terawat, dan wawasan masyarakat menjadi meningkat. Faktor pendorong masyarakat dalam mengembangkan wisata Sumur Panjang di Kecamatan Bontotiro, meliputi: 1) masyarakat diberikan kesempatan; 2) adanya tuntutan lingkungan untuk saling gotong royong; 3) sikap saling menghargai; dan 4) manfaat yang dirasakan untuk peningkatan kesejahteraan. Faktor penghambat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut: 1) latar belakang pekerjaan masing-masing individu yang berbeda-beda membuat kesibukan individu berbeda-beda dan penyempatan waktu untuk ikut berpartisipasi menjadi berbeda-beda; 2) kurangnya pengetahuan dan

wawasan tentang pengembangan wisata yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah; dan 3) kesulitan berkomunikasi dengan bahasa asing saat ada wisatawan dari mancanegara.

*Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengembangan dan Wisata Sumur Panjang*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul;partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata sumur panjang di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Ayahanda sudirman dan Ibunda rosnani sebagai orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil dan ibu Dra. Hj.St. Nurmaeta, MM selaku pembimbing I dan ibu Dr.Hj.Ihyani malik,S.Sos,M,Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibunda Dr.Hj, Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak A. Luhur Prianto, S. IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Terimah kasih kepada Pemerintah kabupaten Bulukumba dan Tokoh Masyarakat yang menjadi informan dalam penulisan karya ilmiah (Skripsi).
4. Seluruh teman-teman Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Angkatan 013 Ilmu Pemerintahan yang senangtiasa menjadi teman diskusi dan teman dalam segala hal mengenai urusan kampus dan perkuliahan.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb*

Makassar, 05-Maret-2018

**A.ZULKIPLI SUDROS**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pernyataan Keaslian Karya Imiah .....	iii
Abstrak .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Partisipasi Masyarakat .....	7
B. Pengembangan Wisata .....	19
C. Dampak Pengembangan Wisata.....	30
D. Pemerintah Daerah .....	35
E. Kerangka Pikir .....	39
F. Fokus Penelitian.....	41
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	43
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	43

C. Informan Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisi Data .....	45
F. Keabsahan Data.....	46

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Atau Karakteristik Obyek Penelitian .....	48
B. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Sumur Panjang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.....	49
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Masyarakat untuk Ikut Berpartisipasi dalam Pengembangan Wisata Sumur Panjang.....	65

#### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA .....	77
----------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang tidak dapat dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dibutuhkan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di tiap-tiap daerah tersebut. Sebagai tindak lanjut penyelenggaraan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan pemerintah terdiri atas urusan pemerintah absolut, urusan pemerintah konkuren, dan urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat misalnya politik luar negeri, ketahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Sementara itu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berada pada pemerintahan konkuren kewenangan pemerintahan konkuren ini meliputi kewenangan daerah atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan.

Pariwisata merupakan sumber daya alam yang tidak akan pernah habis. Oleh karena itu sektor pariwisata harus dirawat dan dijaga keberadaannya. Sektor pariwisata juga merupakan salah satu penyumbang pendapatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Memasuki abad sekarang, perhatian terhadap pariwisata sudah sangat meluas. Hal ini terjadi karena pariwisata mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi masyarakat setempat yang menerima kedatangan wisatawan (*tourist receiving countries*).

Perkembangan dunia pariwisata telah mengalami berbagai perubahan baik perubahan pola, bentuk dan sifat kegiatan, serta dorongan orang untuk melakukan perjalanan, cara berfikir maupun sifat perkembangan itu sendiri. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang melimpah tidak terkecuali di Kabupaten Bulukumba, yang memiliki potensi alam yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan sebagai sektor komoditi yang sangat baik bagi perekonomian masyarakat.

Kabupaten Bulukumba diarahkan sebagai sektor yang dapat diandalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan PAD, pemberdayaan masyarakat sekitar, untuk memperluas kesempatan kerja, dan memasarkan produk-produk budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan kawasan wisata harus terencana, bertahap secara menyeluruh untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Salah satu wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba adalah wisata sumur panjang. Wisata sumur panjang dikenal oleh masyarakat Bulukumba dengan nama permandian Hila-Hila. Permandian yang berada di Kecamatan Bontotiro atau tepatnya mengelilingi mesjid kuno peninggalan Dato Tiro itu hingga saat ini menjadi salah satu destinasi yang paling diincar di musim liburan. Pengunjung yang datang liburan selain menikmati dinginnya air kolam, bahkan ada juga yang membawa air dari kolam dengan menaruhnya di wadah botol karena air yang berada di wisata sumur panjang itu dapat dijadikan obat penyembuh penyakit.

Wisata sumur panjang ini perlu untuk dikembangkan karena pengembangan sektor pariwisata merupakan suatu tindakan yang realistis dan logis, mengingat

dampak positif yang ditimbulkan, diantaranya dapat memperluas kesempatan usaha serta meningkatkan pendapat masyarakat dan mendorong terpeliharanya keamanan dan ketertiban. Beberapa kebijakan pemerintah dalam sektor pariwisata diantaranya pembinaan dan pengembangan kepariwisataan seperti: mengencangkan promosi pariwisata, menyiapkan dan meningkatkan mutu pelayanan dan mutu produk wisata, mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata dan prosuk-produk baru terutama di wilayah timur Indonesia, meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) di bidang kepariwisataan dan melaksanakan kampanye nasional yang berkesinambungan.

Undang-Undang No. 10/2009 Tentang Kepariwisata, dalam sebuah pengelolaan pariwisata perlu direncanakan secara matang dengan memperhatikan segala aspek yang saling mempengaruhi agar tidak terjadi kesalahan yang akan berakibat pada objek wisata tersebut. Apabila objek wisata tersebut memiliki nilai jual yang sangat berharga baik dari sejarahnya atau pun karena jumlahnya yang terbatas di dunia ini. Hal tersebut dapat dimulai dari potensi yang dimiliki suatu wilayah, adat istiadat, perkembangan ekonomi, sampai aspek politik.

Selain itu, dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan suatu wisata. Pada dasarnya partisipasi dibedakan menjadi dua yaitu, partisipasi yang bersifat swakarsadan partisipasi yang bersifat simbolisme. Partisipasi swakarsa mengandung arti bahwa keikutsertaan dan peran sertanya atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri, sementara partisipasi yang dimobilisasikan memiliki arti keikutsertaan dan berperan serta atas dasar pengaruh orang lain..

Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya. Astuti (2013:1) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan pelaksanaan program memperoleh pemanfaatan, dan mengevaluasi program. Mardikanto (2003:25), menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian; kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Sedangkan menurut Theodorson dalam Mardikanto (2010), bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang individu atau masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu.

Keikutsertaan atau keterlibatan yang di maksud disini bukanlah yang bersifat pasif tetapi secara aktif di tujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat di artikan sebagai keikutsertaan seseorang di dalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakat, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Dengan demikian partisipasi merupakan peran aktif atau tidak aktifnya anggota dalam melakukan kegiatan. Partisipasi bermakna mengambil bagian atau ikut serta dalam suatu kegiatan yang di lakukan oleh masyarakat.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengembangan wisata agar objek wisata tersebut dapat berjalan dengan baik dan banyak diminati oleh pengunjung, termasuk wisata sumur panjang. Keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan wisata tersebut bukan hanya keterlibatan mental semata, tetapi harus disertai dengan keterlibatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Menurut Habitat, partisipasi masyarakat bukanlah untuk menyuruh

masyarakat untuk melakukan pekerjaan pada proyek-proyek pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat, menanyakan pendapat masyarakat tentang program yang telah dipersiapkan, untuk selanjutnya membuat perubahan-perubahan kecil dan meminta masyarakat untuk membayar sebagian biaya proyek atau kegiatan yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Sumur Panjang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Sumur Panjang kecamatan Bontotiro kabupaten Bulukumba?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Sumur Panjang kecamatan Bontotiro kabupaten Bulukumba?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Sumur Panjang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor pendukung dan penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Sumur Panjang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata sumur panjang Kecamatan Bontotiro kabupaten Bulukumba.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi masyarakat dalam pengembangan wisata sumur panjang Kecamatan Bontotiro kabupaten Bulukumba.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Partisipasi Masyarakat**

##### **1. Pengertian Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya (Sastropetro, 1995: 205). Astuti (2013: 1) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan pelaksanaan program memperoleh pemanfaatan, dan mengevaluasi program. Mardikanto (2003: 25), menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Sedangkan menurut Theodorson dalam Mardikanto (2010), bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu.

Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud disini bukanlah yang bersifat pasif tetapi secara aktif ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakat, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Dengan demikian partisipasi merupakan peran aktif atau tidak aktifnya anggota dalam melakukan kegiatan. Partisipasi bermakna mengambil bagian atau ikutserta dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

## 2. Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Melaksanakan program atau proyek pembangunan, diperlukan adanya peran serta atau partisipasi masyarakat, sehingga proyek ataupun program pembangunan tersebut tepat sasaran yang mencapai target sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

Masyarakat yang berada di wilayah pengembangan harus didorong untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pembangunan pariwisata untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal. Selain mengikutsertakan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, memandang pentingnya mengikutsertakan pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta, dan anggota masyarakat lainnya untuk turut ambil bagian dalam pengambilan keputusan dan melihat pentingnya pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama dalam menerima manfaat pariwisata. Dengan demikian, perencanaan pembangunan pariwisata harus mengakomodasi keinginan dan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi serta memperoleh nilai manfaat yang maksimal dari pembangunan pariwisata. Partisipasi masyarakat lokal sangat dibutuhkan dalam pengembangan wisata karena masyarakat lokal sebagai pemilik sumber daya pariwisata yang ditawarkan kepada wisatawan (Dewi, 2013: 132).

Masyarakat lokal berperan penting dalam pengembangan desa wisata karena sumber daya dan keunikan tradisi dan budaya yang melekat pada komunitas tersebut merupakan unsur penggerak utama kegiatan wisata. Di lain pihak, komunitas lokal yang tumbuh dan hidup berdampingan dengan suatu objek wisata menjadi bagian dari sistem ekologi yang saling kait mengait. Keberhasilan

pengembangan desa wisata tergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat lokal.

Alasan pentingnya partisipasi masyarakat menurut Conyers dalam Hamzah (2015: 5) adalah:

- a. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh suatu kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya, program atau proyek pembangunan akan gagal.
- b. Masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika mereka merasa dilibatkan dan merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Yang dikemukakan oleh Hamzah (2015: 5), perencanaan dan pengembangan harus melibatkan masyarakat secara optimal melalui musyawarah dan mufakat masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat memiliki enam kriteria, yakni :

- a. Melibatkan masyarakat setempat dan pihak-pihak terkait lain dalam proses perencanaan dan pengembangan obyek wisata
- b. Membuka kesempatan dan mengoptimalkan peluang bagi masyarakat untuk mendapat keuntungan dan berperan aktif dalam kegiatan wisata.
- c. Membangun hubungan kemitraan dengan masyarakat setempat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan.
- d. Meningkatkan ketrampilan masyarakat setempat dalam bidang-bidang yang berkaitan dan menunjang pengembangan obyek wisata.
- e. Mengutamakan peningkatan ekonomi lokal dan menekan tingkat kebocoran pendapatan (*leakage*) serendah-rendahnya.

f. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

### 3. Bentuk-Bentuk Partisipasi

Ndaraha membagi bentuk partisipasi menjadi 6 bentuk yaitu;

- a. Partisipasi dalam/ melalui kontak dengan pihak lain (*kontak change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial,
- b. Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memerikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), mengiyakan, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya.
- c. Partisipasi perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan.
- d. Partisipasi dalam peranan operasional pembangunan
- e. Partisipasi dalam memberi, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan,
- f. Partisipasi dalam menilai pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya di bedakan menjadi dua yaitu konsultatif dan kemitraan pola partisipatif. Pola yang bersifat konsultatif biasanya dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan sebagai suatu strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (*public support*). Dalam pendekatan ini, meskipun masyarakat berkepentingan memiliki hak untuk pendapatannya dan hak untuk diberitahukan, akan tetapi semua keputusan berada ditangan kelompok pembuat keputusan tersebut (pemrakarsa). Pendapat masyarakat bukan sebuah faktor penentu dan pengambilan keputusan, selain sebagai strategi memperoleh dukungan dan legitimasi politik. Sedangkan

pola partisipasi masyarakat yang bersifat kemitraan lebih menghargai masyarakat dengan memberikan posisi yang sama dengan kelompok pengambilan keputusan. Karena diposisikan sebagai mitra kedua kelompok tersebut membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah, dan pembuat keputusan. Dengan adanya konsep ini maka ada upaya pendistribusian kewenangan pengambilan keputusan.

Kedua kepentingan tersebut dapat terwujud jika proses pengambilan keputusan menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka untuk mengungkapkan kepentingan mereka. Proses pengambilan keputusan yang menyediakan kepentingan untuk berperan serta didalamnya, dapat mengantarkan kelompok yang berbeda kepentingan mencapai saling pengertian dan penghayatan terhadap satu sama lain. Dengan demikian perbedaan pengertian dapat di jembatani.

Terdapat beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu partisipasi uang, harta benda, tenaga, keterampilan, sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan representatif. Namun secara garis besar dapat dikelompokkan dua jenis yaitu; partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud), misalnya uang, harta benda, dan keterampilan. Sedangkan kedua adalah bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata, misalkan partisipasi buah pikiran, sosial dan representatif.

Wardiyarto dan Baiquni (2011) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata terdiri dari partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pengelolaan dan partisipasi dalam pemanfaatan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ini dimaksudkan agar masyarakat tidak hanya berperan sebagai obyek melainkan sebagai subyek yang menggagas suatu

rencana pengembangan obyek wisata di daerah mereka. Dalam perkembangannya, definisi dari perencanaan telah bergeser dari sekedar membuat rencana menjadi merencanakan yang sifatnya berkelanjutan yakni tidak hanya rencana pada saat memulai suatu kegiatan, akan tetapi juga merencanakan tahap-tahap pengembangan selanjutnya.

Sama halnya dengan partisipasi dalam perencanaan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dimaksudkan agar masyarakat berperan sebagai obyek sekaligus subyek dalam pengembangan pariwisata di wilayah mereka. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati keuntungan secara optimal dari pengelolaan pariwisata dan dapat menambah sumber pendapatan masyarakat. Dengan berkembangnya usaha pariwisata, masyarakat setempat diharapkan dapat memperoleh pendapatan tambahan sehingga ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya alam akan berkurang. Hal dimaksudkan selain berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan, masyarakat juga harus berpartisipasi dalam tahap pemanfaatan.

Menurut Prety (2011: 115), ada beberapa karakteristik tipologi partisipasi yang berturut-turut semakin dekat dengan bentuk yang ideal, yaitu:

a. Partisipasi Interaktif

Masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan kelembagaan, pola ini cenderung yang melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas keputusan mereka, sehingga mereka memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.

b. Partisipasi Fungsional

Masyarakat membentuk sebagai bagian proyek setelah ada keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, masyarakat tergantung pada pihak luar.

c. Partisipasi Konsultatif

Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahan dalam pola belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.

d. Partisipasi Informatif

Disini masyarakat hanya menjawab pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Akurasi hasil studi tidak dibahas bersama masyarakat.

Tingkat partisipasi masyarakat dapat diukur dengan tiga pendekatan yaitu:

- a. Dimensi pemikiran, yaitu partisipasi dalam bentuk pemikiran dalam usaha mengembangkan Desa wisata. Partisipasi ini akan terlihat dari masukan pemikiran, baik tentang cara pengembangan, paket program, sampai pada media yang digunakan pengembangan wisata.
- b. Dimensi tenaga, yaitu sumbangan berupa tenaga atau fisik yang diperlukan dalam pengembangan desa wisata. Partisipasi ini dapat dilihat dari kesiapan secara fisik dalam mempersiapkan area kunjungan, pemandu wisata, penyediaan sarana-prasaran dan penyediaan penunjang kegiatan.
- c. Dimensi materi, yaitu sumbangan berupa materi dalam pengembangan desa wisata, seperti pengumpulan dana pembangunan. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu

meberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya yang menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal-lah yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya.

Partisipasi masyarakat dalam pemikiran tenaga dan materi untuk pengembangan desa wisata berbeda apabila masyarakat diminta untuk berpartisipasi dengan apabila tidak diminta. Terjadi kecendruangan penurunan partisipasi dari partisipasi yang diminta menjadi partisipasi yang tanpa diminta.

Hal ini berarti bahwa dalam pemikiran, tenaga dan materi masyarakat masih “malu-malu” untuk berpartisipasi, namun penurunan tersebut masih dalam tingkat sedang. Tidak ada perubahan dalam tingkat partisipasi yang rendah, artinya masyarakat sudah memiliki kesiapan untuk partisipasi dalam pengembangan desa wisata, hanya saja masyarakat masih harus diajak secara aktif oleh pengelola untuk berpartisipasi.

#### 4. Tahapan dan Tingkat Partisipasi Masyarakat

Terdapat empat tahap dalam partisipasi masyarakat. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi ini tidak terlepas dari kemampuan kuantitas dari hasil pelaksanaan dalam program yang biasa dicapai. Keempat,

partisipasi dalam evaluasi partisipasi ini bertujuan untuk yang mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Arnstain dalam Ramadhan dan Khadiyanto (2014: 952) mendeskripsikan delapan tingkatan dalam partisipasi masyarakat, yaitu: *manipulation, therapy, informing, consultation, placation, partnership, delegated power* dan *citizen control*. Delapan tingkatan ini memiliki arti dan ciri masing-masing. Sheery juga membagi 8 tingkatan ini menjadi 3 kelompok besar yaitu *nonparticipation, tokenism* dan *citizen power*.

Tingkat pertama dalam tangga partisipasi Arnstain adalah Manipulasi (*manipulation*) dalam tahap ini karakteristik paling menonjolnya adalah fungsi pelibatan masyarakat hanya sebagai pelegalan kekuasaan, tangga selanjutnya adalah terapi (*therapy*) dalam tahap ini pelibatan masyarakat hanya dengan tujuan pembelajaran sehingga tidak ada tindak lanjut dari pelibatan tersebut. Tangga ketiga adalah informaing posisi masyarakat dalam tahap ini masih dilibatkan secara pasif yaitu hanya diinformasikan saja, selanjutnya tangga partisipasi keempat yaitu konsultasi (*consultation*) pada tahap ini masyarakat tidak hanya diinformasikan namun lebih jauh ada kegiatan konsultasi antara pemerintah dan masyarakat dan pada tahap kelima yaitu penempatan perwakilan (*placation*) pada tahap ini masyarakat mempunyai hak untuk menempatkan perwakilannya di pemerintahan. Pada tahap keenam atau disebut tahap kemitraan (*partnership*) posisi pemerintah dan masyarakat menjadi setara dalam kewenangan dan tanggung jawab, selanjutny pada tahap ketujuh yaitu tahap pendelegasian kekuasaan (*delegeted power*) pemerintah sudah mendelegasikan kekuasaanya pada masyarakat sehingga kewenangan masyarakat lebih tinggi dan pada tahap kedelapan atau tahap masyarakat berkuasa (*citizen control*)

fungsi pemerintah semakin sedikit dan mayoritas kewenangan dan tanggung jawab ada pada masyarakat (Ramadhan dan Khadiyanto, 2014: 952).

#### 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembang partisipasi masyarakat yang dapat didekati melalui disiplin keilmuan, diantaranya:

- a. Dalam konsep psikologi, tumbuh dan berkembang partisipasi masyarakat, sangat ditentukan oleh motivasi yang melatarbelakanginya yang merupakan cerminan dari dorongan, tekanan, kebutuhan, keinginan dan harapan yang dirasakan.
- b. Menurut konsep pendidikan, partisipasi merupakan tanggapan atau respon yang diberikan terhadap setiap rangsangan atau stimulus yang diberikan dalam hal ini respon merupakan fungsi dari manfaat atau *reward* yang dapat diharapkan.
- c. Harapan dalam konsep ekonomi sangat yang ditentukan oleh besarnya peluang dan harga dari manfaat yang diperoleh.

Menurut Suwanto dalam Nawawi (2013: 104), pembangunan pariwisata melibatkan semua lapisan masyarakat, mulai dari kalangan atas sampai lapisan bawah, baik kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat biasa. Semua diharapkan turut membantu dan menunjang usaha pembangunan pariwisata. Masyarakat terdorong untuk berpartisipasi apabila mereka mengetahui apa yang perlu mereka bantu dan mengapa mereka harus membantu. Mereka akan tertarik untuk ikut menunjang pembangunan pariwisata apabila mereka telah memahami bahwa mereka akan mendapatkan manfaat yang positif.

Mardikanto dan Poekorto Soebianto (2013), tumbuh dan berkembang partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh adanya

kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Beberapa kesempatan yang dimaksud di sini di antaranya:

- a. Kemauan politik dan masyarakat untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan dan pemanfaatan pembangunan ditingkat pusat sampai jajaran birokrasi tingkat paling bawah.
- b. Kesempatan untuk berpartisipasi untuk disediakan atau ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tidak akan berarti jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. Kemampuan berpartisipasi itu diantaranya:
  - 1) Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan untuk membangun dan memperbaiki hidupnya.
  - 2) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.
  - 3) Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal.
- c. Kemampuan untuk berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki oleh masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupan. Sikap-sikap itu diantaranya:
  - 1) Sikap untuk meninggalkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan.
  - 2) Sikap terhadap penguasa atau pembangunan pada umumnya.
  - 3) Sikap untuk ingin selalu memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat untuk puas diri.

- 4) Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah, dan tercainya tujuan pembangunan
- 5) Sikap untuk kemandirian atau percaya diri atas kemampuan untuk memperbaiki mutuhidupnya.

Demartoto (2010:112) berpendapat bahwa terdapat dua dimensi penting dalam partisipasi masyarakat, dimensi yang pertama adalah siapa yang berpartisipasi dan bagaimana berlangsungnya partisipasi. Berdasarkan latar belakang dan tanggung jawabnya masyarakat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Penduduk setempat
- b. Pemimpin masyarakat
- c. Pegawai pemerintah
- d. Pegawai asing yang mungkin dipertimbangkan memiliki peran penting dalam pembangunan.

Semua pelaksanaan suatu program merupakan persyaratan murni, artinya pelaksanaan suatu program harus memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum mereka. Dimensi yang kedua bagaimana partisipasi itu berlangsung. Ini penting karena untuk mengetahui hal-hal seperti;

- a. Apakah inisiatif itu datang dari administrator ataukah dari masyarakat setempat
- b. Apakah dorongan partisipasi itu sukarela atau pemaksaan
- c. Saluran partisipasi itu apakah berlangsung dalam berisik atau kolektif, dalam organisasi formal atau informal, dan apakah partisipasi itu secara langsung atau melibatkan wakil

- d. Durasi partisipasi
- e. Ruang lingkup partisipasi, sekali atau menyeluruh sementara atau berlanjut dan meluas
- f. Memberikan kekuasaan yang meliputi bagaimana keterlibatan efektif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan yang mengarah pada hasil yang diharapkan.

Pemahaman terhadap kelangsungan kedua dimensi partisipasi diatas terwujud dari suatu dinamika badan akibat partisipasi. Jika diterapkan dengan tepat, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah tentang “siapa” yang berpartisipasi, “apa” yang dipertimbangkan dalam partisipasi.

## **B. Pengembangan Wisata**

Pengertian pengembangan menurut J.S Badudu (2003:4) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memberikan definisi pengembangan adalah hal, cara atau hasil kerja mengembangkan. Sedangkan mengembangkan berarti membuka, memajukan, menjadikan maju dan bertambah baik.

Pariwisata adalah sebuah mega bisnis. Jutaan orang mengeluarkan triliunan dolar amerika, meninggalkan rumah dan pekerjaan untuk memuaskan atau membahagiakan diri (*pleasure*) dan untuk menghabiskan waktu luang (*leisure*). Pariwisata sebagai salah satu sektor pembangunan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh pemerintah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Pariwisata yang bersifat multisektoral merupakan fenomena yang sangat kompleks dan sulit didefinisikan secara baku untuk diterima secara universal. Sehingga menimbulkan berbagai persepsi pemahaman terhadap pariwisata, baik sebagai industri, sebagai aktivitas, atau sebagai sistem (Hamzah, 2015: 3).

Pariwisata secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti berulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berputar-putar, berulang-ulang atau berkali-kali. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasyah dan rekreasi untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam (Riskayana dkk, 2012: 183).

Bila dilihat dari sisi Undang- Undang Republik Indonesia No.9 Tahun 1990, tentang kepariwisataan dalam pasal 1 menyatakan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
4. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
5. Usaha kepariwisataan adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.

6. Obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
7. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang di bangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah suatu kegiatan kemanusiaan berupa hubungan anatara orang baik dari negara yang sama antarnegara atau hanya dari daerah lain atau negara lain atau benua lain untuk memenuhi berbagai kebutuhan kecuali kegiatan untuk memperoleh penghasilan, meskipun pada perkembangan selanjutnya batasan “memperoleh penghasilan” masih kabur (Riskayana, dkk, 2012: 183).

WTO dalam Prabowo, dkk (2016: 19) menjelaskan bahwa batasan pariwisata secara khusus sebagai komponen pokok sebagai berikut: (1) seseorang atau sekelompok orang melakukan perjalanan antar dua atau tiga lebih lokasi disebut traveler; (2) seseorang atau sekelompok orang melakukan perjalanan yang tidak menjadi tempat tinggal dan melakukan perjalanan kurang dari 12 bulan, dengan tujuan perjalanan bukan untuk mencari nafkah di tempat tujuan disebut visitor; (3) seseorang atau sekelompok orang yang menghabiskan waktu minimal 24 jam di daerah yang dikunjungi disebut tourist.

Yang di kemukakan oleh Spillane dalam Meray (2016: 49), ada lima unsur komponen pariwisata yang sangat penting, yaitu:

1. *Attractions* (daya tarik). *Attractions* dapat digolongkan menjadi *site attractions* dan *event attractions*. *Site attractions* merupakan daya tarik

fisik yang permanendengan lokasi yang tetap yaitu tempat-tempat wisata yang ada di daerah tujuan wisata seperti kebun binatang, keratin, dan museum. Sedangkan *event attractions* adalah atraksi yang berlangsung sementara dan lokasinya dapat diubah atau dipindah dengan mudah seperti festival-festival, pameran, atau pertunjukan-pertunjukan kesenian daerah.

2. *Facilities* (fasilitas-fasilitas yang diperlukan). Fasilitas cenderung berorientasi pada daya tarik di suatu lokasi karena fasilitas harus terletak dekat dengan pasarnya. Selama tinggal di tempat tujuan wisata wisatawan memerlukan tidur, makan dan minum oleh karena itu sangat dibutuhkan fasilitas penginapan.
3. *Infrastructure* (infrastruktur). Daya tarik dan fasilitas tidak dapat dicapai dengan mudah kalau belum ada infrastruktur dasar. Perkembangan infrastruktur dari suatu daerah sebenarnya dinikmati baik oleh wisatawan maupun rakyat bagi penduduk yang bukan wisatawan.
4. *Transportations* (transportasi). Dalam objek wisata kemajuan dunia transportasi atau pengangkutan sangat dibutuhkan karena sangat menentukan jarak dan waktu dalam suatu perjalanan pariwisata. Transportasi baik transportasi darat, udara, maupun laut merupakan suatu unsur utama langsung yang merupakan tahap dinamis gejala-gejala pariwisata.
5. *Hospitality* (keramahtamahan). Wisatawan yang berada dalam lingkungan yang tidak mereka kenal memerlukan kepastian jaminan keamanan khususnya untuk wisatawan asing yang memerlukan gambaran tentang tempat tujuan wisata yang akan mereka datangi.

Pendapat oleh Rani (2014: 415), dalam sistem pariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum, pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu (1) masyarakat, (2) swasta, (3) pemerintah. Yang termasuk masyarakat adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata, seperti kebudayaan. Termasuk ke dalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media massa. Selanjutnya, dalam kelompok swasta adalah asosiasi usaha pariwisata dan para pengusaha, sedangkan kelompok pemerintah adalah berbagai wilayah administrasi, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Penyelenggaraan sistem pariwisata dapat berjalan dengan sempurna bila komponen-komponen tersebut melebur menjadi satu dan saling mendukung satu dengan lainnya, seperti kewajiban pemerintah adalah bersama-sama merencanakan, pembangunan, pengorganisasian, pemeliharaan, dan pengawasan dengan pemerintah daerah lainnya dalam segala sektor yang mendukung kegiatan pariwisata.

Damanik dalam Meray (2016: 49), pelaku pariwisata adalah setiap pihak yang berperan dan terlibat dalam kegiatan pariwisata. Adapun yang menjadi pelaku pariwisata adalah:

1. Wisatawan

Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan. Wisatawan memiliki beragam motif dan latar belakang (minat, ekspektasi, karakteristik social, ekonomi, budaya, dan sebagainya) yang

berbeda-beda dalam melakukan kegiatan wisata. Perbedaan tersebut, wisatawan menjadi pihak yang menciptakan permintaan produk dan jasa wisata.

## 2. Industri Pariwisata/Penyedia Jasa

Industri pariwisata/penyedia jasa adalah semua usaha yang menghasilkan barang dan jasa bagi pariwisata. Mereka dapat digolongkan ke dalam 2 golongan utama, yaitu:

- a. Pelaku langsung, yaitu usaha-usaha wisata yang menawarkan jasa secara langsung kepada wisatawan atau yang jasanya langsung dibutuhkan oleh wisatawan. Termasuk dalam kategori ini adalah hotel, restoran, biro perjalanan, pusat informasi wisata, atraksi hiburan, dan lain-lain.
- b. Pelaku tidak langsung, yaitu usaha yang mengkhususkan diri pada produk-produk yang secara tidak langsung mendukung pariwisata, misalnya usaha kerajinan tangan, penerbit buku atau lembaran panduan wisata, dan sebagainya.

## 3. Pendukung Wisata

Pendukung wisata adalah usaha yang tidak secara khusus menawarkan produk dan jasa wisata tetapi seringkali bergantung pada wisatawan sebagai pengguna jasa dan produk itu. Termasuk didalamnya adalah penyedia jasa fotografi, jasa kecantikan, olahraga, penjualan BBM, dan sebagainya.

## 4. Pemerintah

Pemerintah adalah sebagai pihak yang mempunyai otoritas dalam peraturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggungjawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata.

Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi stakeholder yang lain dalam memainkan peran masing-masing.

#### 5. Masyarakat Lokal

Masyarakat Lokal adalah masyarakat yang bermukim di kawasan wisata. Mereka merupakan salah satu pemeran penting dalam pariwisata karena sesungguhnya merekalah yang akan menyediakan sebagian besar atraksi sekaligus menentukan kualitas produk wisata. Selain itu, masyarakat lokal merupakan pemilik langsung atraksi wisata yang dikunjungi sekaligus dikonsumsi wisatawan. Air, tanah, hutan, dan lanskap merupakan sumber daya pariwisata yang dikonsumsi oleh wisatawan dan pelaku wisata lainnya berada ditangan mereka. Kesenian yang menjadi salah satu daya tarik wisata dan juga hampir sepenuhnya milik mereka.

#### 6. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan *Non Government Organisation* (NGO) yang sering melakukan aktivitas kemasyarakatan diberbagai bidang, termasuk bidang pariwisata

Yang dikemukakan oleh Sastrayuda dalam Meray (2016: 50), bahwa perencanaan pengembangan wisata meliputi :

1. Pendekatan *Participatory Planning*, dimana seluruh unsur yang terlibat dalam perencanaan dan pengembangan kawasan objek wisata diikutsertakan baik secara teoritis maupun praktis.
2. Pendekatan potensi dan karakteristik ketersediaan produk budaya yang dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan objek wisata.

3. Pendekatan pemberdayaan masyarakat, adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya agar tercapai kemampuan baik yang bersifat pribadi maupun kelompok.
4. Pendekatan kewilayahan, faktor keterkaitan antar wilayah merupakan kegiatan penting yang dapat memberikan potensinya sebagai bagian yang harus dimiliki dan diseimbangkan secara berencana.
5. Pendekatan optimalisasi potensi, dalam optimalisasi potensi yang ada di suatu desa seperti perkembangan potensi kebudayaan masih jarang disentuh atau digunakan sebagai bagian dari indikator keberhasilan pengembangan.

Menurut Hamzah (2015: 4), dalam hubungannya dengan pengembangan pariwisata terdapat beberapa jenis pengembangan, yaitu:

1. Keseluruhan dengan tujuan baru, membangun atraksi di situs yang tadinya tidak digunakan sebagai atraksi.
2. Tujuan baru, membangun atraksi pada situs yang sebelumnya telah digunakan sebagai atraksi.
3. Pengembangan baru secara keseluruhan pada keberadaan atraksi yang dibangun untuk menarik pengunjung lebih banyak dan untuk membuat atraksi tersebut dapat mencapai pasar yang lebih luas, dengan meraih pangsa pasar yang baru.
4. Pengembangan baru pada keberadaan atraksi yang bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pengunjung atau mengantisipasi meningkatnya pengeluaran sekunder oleh pengunjung.

5. Penciptaan kegiatan-kegiatan baru atau tahapan dari kegiatan yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain dimana kegiatan tersebut memerlukan modifikasi bangunan dan struktur.

Pengembangan daya tarik wisata merupakan suatu rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata, mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan suatu obyek wisata. Obyek wisata dapat berkembang di suatu tempat pada dasarnya karena tempat tersebut memiliki daya tarik, yang mampu mendorong wisatawan untuk datang mengunjunginya (Hamzah, 2015: 4).

Pengembangan pariwisata disuatu daerah menurut O'Grandy dalam Irianto (2003) haruslah memenuhi kriteria tertentu, yaitu:

1. Keputusan tentang bentuk pariwisata haruslah dikonsultasikan dengan niasyarakat setempat dan ciapat diterima oleh masvarakat.
2. Keuntungan yang diperoleh ciari ciaerali wisata haruslah kembali ke masyarakat.
3. Memenuhi kriteria lingkungan hidup, budaya lokal, agama, dan penduduk setempat.

Yang dikemukakan oleh usman (2010:13), jika dilihat dari motif dan tujuan perjalanan pariwisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*)

Jenis ini dilakukan oleh mereka yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari udara segar yang baru, memenuhi kehendak ingin tahunya, mengendorkan ketegangan sarafnya, melihat sesuatu yang baru, menikmati

keindahan alam, mengetahui hikayat rakyat, mendapatkan kedamaian, atau bahkan menikmati kota-kota besar dan ikut serta keramaian pusat-pusat wisatawan. Jenis wisata menyangkut banyak unsur dan sifatnya berbeda karena pengertian pleasure berbeda kadar pemuasnya sesuai dengan karakter, citarasa, latar belakang kehidupan, dan temperamen masing-masing individu.

#### 2. Pariwisata untuk rekreasi (*recreation tourism*)

Jenis ini dilakukan oleh mereka yang menghendaki kemanfaatan hari liburnya untuk beristirahat, memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohaninya, menghilangkan kelelahannya. Dan biasanya mereka tinggal selama mungkin ditempat yang dianggap benar menjamin tujuan rekreasi tersebut, dengan kata lain mereka lebih menyukai *halt resort*. Termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang alasan kesehatan dan kesembuhan yang harus tinggal ditempat khusus untuk memulihkan kesehatannya (seperti daerah sumber air panas, dan lain-lain).

#### 3. Pariwisata untuk kebudayaan (*cultural tourism*)

Jenis ini ditandai dengan adanya motivasi seperti keinginan belajar di pusat pengajaran dan riset, untuk mengetahui adat istiadat, kelembagaan dan cara hidup rakyat di negara lain, untuk mengunjungi monumen bersejarah, beradapan masa lalu atau sebaliknya untuk mengunjungi penemuan besar masa kini, pusat kesenian, pusat keagamaan atau juga untuk ikut serta dalam festival, teater, tarian rakyat, dan sebagainya.

#### 4. Pariwisata untuk olahraga (*sport tourism*)

Jenis ini dapat dibagi ke dalam dua teori;

- a. *Bigsport event*, yaitu peristiwa olahraga besar (olimpiade) yang menarik perhatian tidak hanya olahragawan sendiri tidak hanya olahragawan sendiri.

b. *Sporting tourism of the pracsioneart*, yaitu peristiwa olahraga bagi mereka yang ingin berlatih dan mempraktekan sendiri, seperti, naik kuda, berburu, dan lain-lain.

5. Pariwisata untuk usaha dagang (*business tourism*)

Yaitu perjalanan usaha dalam bentuk profesional travel atau perjalanan karna ada kaitannya dengan pekerjaan atau jabatan yang tidak memberikan pelakunya baik pemilihan daerah maupun waktunya. Tersirat tidak hanya profesional trip yang dilakukan kaum pengusaha atau industrialis, tetapi juga mencakup semua kunjungan ke pameran, keintrasi teknik yang bahkan menarik orang di luar profinsi. Juga harus diperhatikan tidak hanya pengusaha dan berbuat sebagai konsumen, tetapi dalam waktu sebatas-batasnya, sebagai wisatawan biasa dalam pengertian sosiologis kerna mengambil dan memanfaatkan keuntungan antraksi di negara tersebut.

6. Pariwisata untuk konvensi (*counvention tourism*)

Sekarang sebagai daerah wisata banyak yang mengajukan diri untuk temoat konvesi. Bahkan untuk tujuan tersebut sudah banyak negara yang membentuk asosiasi- asosiasi sebagai sarana yang dianggap penting utnuk dicapai tingkat pengisian kamar yang layak pada hotel mereka, terutama pada musim-musim menurunnya jumlah wisatawan yang masuk ke dalam negara tersebut. Banyaknya negara yang menyadari besarnya potensi ekonomi dari jenis pariwisata konvensi ini, sehingga mereka saling menyiapkan dan mendirikan bangunan yang khusus dilengkapi untuk tujuan ini atau membangun 'pusat konverensi' lengkap dengaka dengan fasilitas mutahir yang dilengkapi untuk menjamin konverensi operasional.

### **C. Dampak Pengembangan Wisata**

Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, maka tujuan pembangunan pariwisata adalah 1) mengembangkan dan memperluas diversifikasi produk dan kualitas pariwisata nasional; 2) berbasis pada pemberdayaan masyarakat, kesenian dan sumber daya (pesona) alam lokal dengan memperhatikan kelestarian seni dan budaya tradisional serta kelestarian lingkunganhidup setempat, dan 3) mengembangkan serta memperluas pasar pariwisata terutama pasar luar negeri (Depbudpar dalam Ernawati, 2011: 70).

Pariwisata dapat menumbuhkan dan meningkatkan pengenalan budaya dan rasa cinta terhadap tanah air. Dari sektorpariwisata juga dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak, retribusi parkir dan karcis atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan yangberkunjung. Adanya pariwisata juga akan menumbuhkan usaha-usaha ekonomi disekitar area wisata dan menunjang kegiatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat (Kurniawan dkk, 2013: 48).

Wiranatha dalam Ernawati (2011:72), menuturkan bahwa perkembangan kepariwisataan memberikan dampak positif maupun negatif terhadap daerah dan masyarakat dimana kegiatan pariwisata tersebut dilaksanakan. Secara umum, pariwisata berdampak positif terhadap perekonomian yaitu peningkatan pendapatan masyarakat di daerah tujuan wisata, membuka lapangan pekerjaan, dan peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum di daerah tujuan wisata. Namun, pariwisata juga dapat berdampak negatif, seperti terjadinya degradasi sosial-budaya masyarakat. Dampak negatif juga bisa terjadi padaperekonomian masyarakat dimana terjadi kesenjangan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat antara pelaku pariwisata dengan masyarakat lain yang tidak bersentuhan dengan pariwisata secara langsung, serta ketidakberdayaan masyarakat lokal dalam hal persaingan ekonomi dengan investor dari luar daerah.

Sebenarnya perubahan sosial budaya tidak selalu berarti buruk. Yang menjadi persoalan dalam interaksi antara masyarakat lokal dengan para wisatawan adalah ketidakmampuan masyarakat menangkap dengan jelas budaya yang dibawa oleh para wisatawan dan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan oleh para wisatawan dan ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan yang terjadi, khususnya yang disebabkan oleh perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Kondisi demikian menyebabkan masyarakat lokal tidak jarang melakukan suatu peniruan-peniruan budaya masyarakat pendatang (wisatawan) secara tidak tepat yang didukung oleh kondisi ekonomi yang lebih mencukupi untuk melakukan berbagai peniruan budaya tersebut. Padahal di sisi lain budaya khas masyarakat lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pariwisata (Sunarminto dalam Ernawati, 2011: 72).

Secara teoritis, Cohen dalam Ernawati (2011: 72), mengelompokkan dampak sosial budaya pariwisata ke dalam sepuluh kelompok besar, sebagai berikut.

1. Dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang lebih luas, termasuk tingkat otonomi atau ketergantungannya;
2. Dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota masyarakat;
3. Dampak terhadap dasar-dasar organisasi/kelembagaan sosial;

4. Dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata;
5. Dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat;
6. Dampak terhadap pola pembagian kerja;
7. Dampak terhadap stratifikasi dan mobilitas sosial;
8. Dampak terhadap distribusi pengaruh dan kekuasaan;
9. Dampak terhadap meningkatnya penyimpangan-penyimpangan sosial;
10. Dampak terhadap bidang kesenian dan adat istiadat.

Menurut Irianto (2003: 13), ada 3 dampak pariwisata yaitu:

1. Terhadap masyarakat baik sektor formal maupun sektor non formal yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang akan berpengaruh pula terhadap jumlah pengusaha dengan sendirinya akan berpengaruh pula terhadap pendapatan.
2. Terhadap pembangunan fisik dalam hal ini perkembangan ruas jalan mau tidak mau akan muncul usaha rumah makan yang akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sekaligus terhadap pendapatar, masyarakat.
3. Terhadap lingkungan yang mau tidak mau akan berpengaruh pula terhadap keindahan dan ketidakberaturan seliingga untuk itu dibutuhkan pula tenaga kerja untuk pembenalian, berarti akan menambah peluang berusaha, dengan sendirinya juga meningkatkan pendapatan keluarga.

Luthfi (2013: 8), pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat. Salah satunya dampaknya adalah dalam bidang ekonomi. Dampak positifnya : (1) Membuka lapangan kerja bagi penduduk lokal di bidang pariwisata seperti : *tour guide*, *waiter*, *bell boy*, dan lain-lain, (2) Dibangunnya fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik demi kenyamanan para wisatawan

yang juga secara langsung dan tidak langsung bisa dipergunakan oleh penduduk lokal pula. Seperti : tempat rekreasi, mall, dan lain-lain; (3) Mendapatkan devisa (*national balance payment*) melalui pertukaran mata uang asing (*foreign exchange*). Sedangkan dampak negatifnya adalah: (1) bahaya ketergantungan yang sangat mendalam terhadap pariwisata; (2) meningkatkan inflasi dan harga jual tanah menjadi mahal; (3) meningkatkan impor barang dari luar negeri, terutama alat-alat teknologi modern yang digunakan untuk memberikan pelayanan bermutu pada wisatawan dan juga biaya-biaya pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang ada.

Dampak sosial yang ditimbulkan dengan adanya pengembangan pariwisata menyangkut berbagai aspek perubahan sosial, moral atau perilaku, agama, bahasa, dan kesehatan. Perubahan sikap dan gaya hidup masyarakat terlihat pada perilaku mereka yang cenderung menjadi konsumtif dan materialistis. Dampak sosial pariwisata dapat digambarkan sebagai berikut:

Soekadijo dalam Biantoro dan Ma'rif (2014: 1041), dampak sosial ekonomi yaitu dampak negatif atau dampak positif yang timbul terhadap lingkungan sosial ekonomi dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat perkembangan pariwisata terhadap perubahan pekerjaan dan pendapatan masyarakat, pola pembagian kerja, kesempatan kerja dan berusaha. Pariwisata adalah suatu gejala sosial yang kompleks dan menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai aspek seperti sosiologis, psikologis, ekonomis, ekologis, dan lain-lain. Aspek yang mendapat perhatian paling besar dan hampir merupakan satu-satunya aspek yang dianggap penting ialah aspek ekonomi. Dalam skala nasional, pengembangan pariwisata akan memberikan

dampak positif terhadap perekonomian suatu negara. Dampak tersebut dibagi menjadi dua menurut Ma'rif (2014: 1041), yaitu:

1. Pengaruh yang ditimbulkan secara langsung, meliputi:
  - a. Kegiatan industri pariwisata mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong munculnya berbagai lapangan kerja dan usaha yang menunjang kegiatan pariwisata.
  - b. Meningkatkan perkembangan suatu daerah, karena pada umumnya daerah wisata terletak di pantai, gunung-gunung dan daerah-daerah terpencil yang mempunyai keindahan alam yang dapat dijadikan sebagai obyek wisata. Sehingga kegiatan ekonomi dapat berkembang dan meluas ke daerah-daerah tersebut.
2. Pengaruh tak langsung yang ditimbulkan oleh pengembangan pariwisata adalah:
  - a. Dampak Penggandaan (*Multiplier Effect*). Sejumlah uang yang diterima dalam masyarakat akan menimbulkan beberapa transaksi yang jumlahnya tergantung pada kondisi ekonomi.
  - b. Memajukan pasaran produk-produk tertentu karena pariwisata merupakan daya konsumsi yang dinamis yang dapat mendorong konsumsi produk-produk tersebut.
  - c. Penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak langsung maupun retribusi dari karcis, tunda masuk dan parkir kendaraan.

Pembangunan pariwisata dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran akan identitas nasional dan kebersamaan dalam keragaman, pembangunan pariwisata dikembangkan dengan pemerataan, ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan berorientasi pengembangan wilayah, bertumpu pada

masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti SDM, pemasaran, destinasi, dan IPT dan lintas sektor, kerjasama antar negara, memperdayakan usaha kecil dan tanggung jawab dalam pemanfaatan SDA dan budaya.

Ditinjau dari segi kebudayaan, sektor pariwisata Indonesia memperkenalkan kepada wisatawan asing. Jadi faktor pariwisata memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan nasional untuk itu segala potensi yang ada di NKRI perlu dimanfaatkan dengan baik. Konsep ini menunjukkan bahwa pariwisata hanya dapat memberikan keuntungan yang panjang bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat bilamana kondisi suatu wilayah geografis menjadi lebih baik atau setidaknya tidak menjadi lebih buruk, baik dari aspek lingkungan hidup, budaya, warisan budaya yang ada dan kualitas hidup penduduk yang hidup disana.

Bila kemudian pariwisata akan dianggap sebagai modal pembangunan maka lebih tepat untuk dikatakan bahwa pariwisata merupakan model atau pendekatan pembangunan (ekonomi) berbasis fenomena pergerakan seseorang dari satu tempat ketempat lainnya. Dengan demikian dapat dipahami bila kemudian pariwisata dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi sebuah negara.

#### **D. Pemerintah Daerah**

Undang-Undang No 32 tahun 2004 yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah lokal dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Widarta dalam Primadany dkk (2013: 137), memaparkan bahwa pemerintah daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah.

Berbagai alasan yang diungkapkan untuk mendorong pemerintah suatu negara membangun pariwisata yang berkelanjutan, berbagai motivasi tersebut dapat menjadi peluang bagi negara untuk membangun ekonominya melalui suatu pola kebijakan dan terintegrasi, peluang tersebut mengandung pengertian terbukanya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar destinasi pariwisata, nilai-nilai, citra suatu wilayah, geografis termasuk yang miskin dan sumber daya ekonomi dan mendorong revitalisasi suatu wilayah geografis yang telah kehilangan daya tariknya misalnya kota tua dekat pertambangan (Erianto,2001).

Pariwisata dapat di manfaatkan sebagai media untuk mencapai tujuan NKRI yang jauh lebih besar dan berdampak jangka panjang. Pariwisata seharusnya dapat dijadikan media pendidikan khususnya bagi wisatawan sebagaimana diketahui dan akan di bahas pada bagian lainnya. Kepariwisatawan dapat pula menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat luas dan lingkungan alam. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengembangkan kebijakan pembangunan pariwisata yang dapat mendidik wisata untuk menghormati budaya lokal di destinasi pariwisata dan mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup. Jika kedua tujuan tersebut dapat dicapai maka konsep pembangunan yang berkelanjutan sebenarnya

telah dicapai. Namun demikian, sebagaimana akan dijelaskan tidak mudah untuk mewujudkan terutama jika di kaitkan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, terlebih lagi di negara berkembang.

Pariwisata juga dapat juga di manfaatkan sebagai media untuk menjual barang dan jasa produksi dalam negeri hal tersebut berkaitan dengan sebuah pepatah yang menyatakan bahwa pariwisata adalah sebuah cara yang lebih cerdas walaupun belum dapat di buktikan secara akurat mengenai penelitian hubungan sebab akibatnya dapat di duga bahwa di negara maju pariwisata di gunakan untuk mempromosikan barang dan jasa yang mereka produksi, contoh; sektor pariwisata yang selau berkaitan dengan keahlian NKRI tersebut.

Pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena Daerah adalah masyarakat hukum yang tentu batas wilayahnya, menurut Rasyid ( 2000:13) peran pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat lebih menekankan supaya mendahulukan keentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan *power* yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Yang dikemukakan oleh Siagian (2001:142), pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan nasional. Beberapa peran pemerintah tersebut di antaranya:

1. Sebagai stabilisator, pemerintah selaku stabilitator yaitu dalam hal mewujudkan perubahan tidak berubah jadi gejolak sosial, apalagi yang dapat merupakan ancaman bagi kebutuhan nasional serta NKRI.
2. Sebagai inovator. Inovasi merupakan salah satu produk kreativitas. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti penemuan baru, metode baru, sistem baru dan yang terpenting cara berpikir yang baru. Dengan

demikian, dalam memainkan peranan selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru yang dikemukakan di atas.

3. Sebagai modernisator. Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern. Berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkannya diperlukan pembangunan yang sistematis, programatis, dan berkelanjutan. Pemerintahlah yang bertugas untuk menggiring masyarakat kearah kehidupan modern. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa agar pemerintah mampu memainkan peranan penting itu, maka proses modernisasi harus terjadi di lingkungan birokrasi pemerintahan sendiri.
4. Sebagai pelopor. Pemerintah harus memainkan peranan selaku pelopor dalam berbagai segi kehidupan bernegara. Dengan perkataan lain, selaku pelopor, pemerintah harus menjadi panutan (*“role model”*) bagi seluruh masyarakat.
5. Sebagai pelaksana sendiri. Meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata-mata, karena berbagai pertimbangan, seperti keselamatan negara, modal yang terbatas, kemampuan yang masih belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional memang merupakan tugas pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah. Pemerintah masih dituntut untuk memainkan peranan selaku pelaksana sendiri berbagai kegiatan meskipun diharapkan bahwa makin maju suatu masyarakat makin berkurang pula peranan tersebut.

Menurut arif (2012:66), peran pemerintah daerah ada 4 yaitu;

1. Sebagai regulator, peran pemerintah sebagai regulato adalah menyiapkan arah untuk pembangunan melalui penerbitan peraturan. Sebagai regulato pemerintah membverikan acuan dasr sebagai instrumen sebagai pelaksanaan pemberdayaan.
2. Sebagai dinamisator, pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multi pihak tatkala statgnasi terjadi dalam proses pembangunan. Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang insentif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam dinamika pemerintah melalui timpenyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.
3. Sebagai fasilitator, peran pemerintah adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksana pembangun untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptialkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendamping melalui pelatihan, pendidikan dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan atau pemodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan.
4. Sebagai motivator, fungsi pemerintah sebagai pendorong dan pemberi semangat kepada masyarakat setempat, agar ikut melakukan tindakan yang positif sehingga apa yang diharapkan dapat lebih berkembang dan suatu saat menjadi penopang perekonomian yang ada.

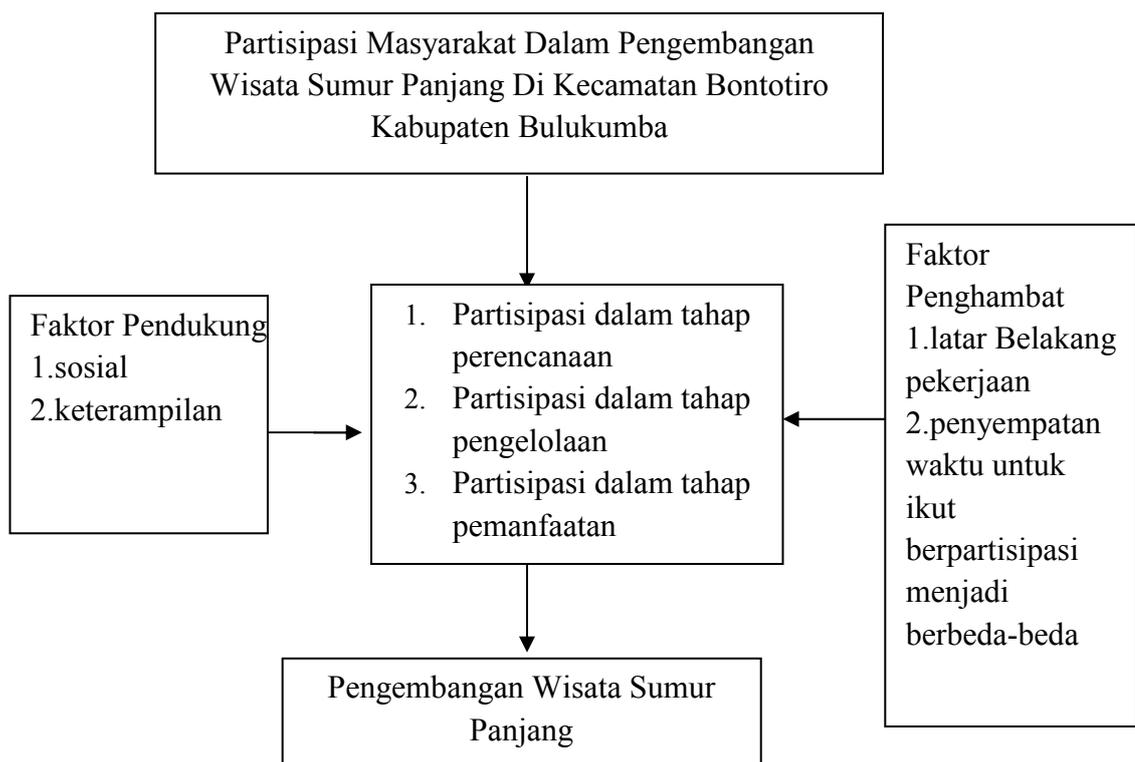
#### **E. Kerangka Pikir**

Wardiyarto 2011, mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata terdiri dari a) partisipasi dalam perencanaan, b).

partisipasi dalam pengelolaan, dan c).partisipasi pemanfaatan.partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan ini di maksudkan agar masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek melainkan sebagai subjek yang menggagas suatu rencana pengembangan objek wisata di daerah mereka.dalam perkembangannya definisi dari perencanaan telah bergeser dari sekedar membuat rencana pada saat memulai suatu kegiatan,akan tetapi juga merencanakan tahap-tahap pengembangan selanjutnya.

Dalam pengembangan wisata khususnya wisata yang diharapkan melibatkan banyak masyarakat untuk mengembangkan pariwisata agar menjadi wisata jagka panjang tentunya memiliki bebrapa faktor yang mempengaruhi sperti halnya faktor pendukung yang terdiri dari a). Sosial,b). Keterampilan serta faktor penghambat a). Latar Belakang Pekerjaan b). penyempatan waktu untuk ikut berpartisipasi menjadi berbeda-beda.

### Bagan Kerangka Pikir



## **F. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata Sumur Panjang Di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, Partisipasi dalam tahap perencanaan, Partisipasi dalam tahap pengelolaan dan Partisipasi dalam tahap pemanfaatan Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dan faktor mendorong dan faktor penghambat partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan wisata sumur panjang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

## **G. Deskripsi Fokus Penelitian**

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan wisata sumur panjang yang meliputi:

1. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, yaitu a. ) masyarakat tidak hanya berperan sebagai obyek melainkan sebagai subyek b.masyarakat merencanakan pengembangan wisata yang sifatnya berkelanjutan
2. Partisipasi masyarakat dalam tahap pengelolaan yaitu a) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana b) keikutsertaan dalam memberikan pelayanan
3. Partisipasi dalam tahap pemanfaatan yaitu a) Adanya pendistribusian hasil b) tingkat keseimbangan distribusi hasil .
4. Sosial proses masyarakat melakukan suatu interaksi
5. Keterampilan adanya kemahiran masyarakat dalam mengembangkan wisata di daerahnya dengan
6. Latar Belakang pekerjaan
7. Penyempatan waktu untuk ikut berpartisipasi menjadi berbeda-beda.

8. Pengembangan wisata sumur panjang memberikan dampak positif maupun negative terhadap daerah dan masyarakat dimana kegiatan wisata dilaksanakan secara umum, wisata sumur panjang berdampak positif terhadap perekonomian peningkatan pendapatan masyarakat di daerah wisata sumur panjang kecamatan bontotiro kabupaten bulukumba.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan mulai dari Desember 2017 sampai Februari 2018 berlokasi di Wisata Sumur Panjang Kecamatan Bonto Tiro Kabupaten Bulukumba. Dengan alasan dan pertimbangan bahwa dalam meningkatkan mutu wisata maka perlu adanya partisipasi masyarakat serta peran pemerintah setempat, selain itu lokasi penelitian juga mudah dijangkau.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung dan wawancara mendalam dengan informan yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana tipe penelitian ini menggambarkan atau melukiskan situasi tertentu berdasarkan data yang diperoleh secara terperinci sesuai permasalahan yang ditetapkan dalam penelitian ini.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan yaitu Fenomenologi, yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman oleh informan dan mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin lalu kemudian melakukan penarikan kesimpulan mengenai apa partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata.

### C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan informan penelitian ini sebanyak 6 orang, seperti dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Inisial	Jumlah
1	H.A.Angsar S.Sos.MM	Camat Bontotiro	AR	1 orang
2	Rajamuddin	Pengelola	RJ	2 orang
	Arwin	Pengelola	AN	
3	Sudirman	Toko Masyarakat	SD	3 orang
	Kurniawan	Toko Masyarakat	KW	
	Supardi	Toko Masyarakat	SP	
<b>Total Informan</b>				<b>6 orang</b>

### D. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan dengan cara tatap muka dan mengadakan tanya jawab kepada informan.

#### 2. Dokumentasi

Dalam teknik Dokumentasi ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, map, CD, file, foto, arsip dan lain sebagainya. Melalui teknik dokumentasi ini akan diamati fenomena dari obyek yang diteliti dari berbagai dokumen yang ada.

### 3. Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai lokasi penelitian.

## **E. Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan hasil observasi dalam penelitian ini dihimpun dan dideskripsikan. Tahap-tahap analisis data, yaitu sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi data kasar yang ada dalam catatan lapangan. Reduksi data ini akan berlangsung terus selama pelaksanaan penelitian dan dalam kegiatan ini data yang tidak berguna atau tidak diperlukan untuk kepentingan kegiatan analisis akan dibuang. Peneliti dalam kegiatan analisisnya akan selalu melakukan reduksi data dari sebelum pengumpulan data di lapangan sampai proses verifikasi selesai dan tidak membutuhkan data baru lagi. Reduksi juga bisa dinyatakan sebagai bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, mengurangi hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan akhir dapat dilaksanakan.

### 2. Penyajian Data

Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, gambaran dalam bentuk narasi lengkap yang untuk selanjutnya memungkinkan

simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data disusun berdasarkan pokok-pokok yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan dengan menggunakan kalimat dan bahasa peneliti yang merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis, sehingga bila dibaca, akan bisa mudah dipahami.

Sajian data dalam penelitian ini selain dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan serta tabel sebagai pendukung narasinya. Semuanya itu dirancang guna merakit informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan dapat lebih dimengerti dalam bentuknya yang lebih kompak.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan simpulan merupakan komponen analisis yang memberikan penjelasan secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Simpulan yang diperoleh dari penyajian data bersifat sementara sebab masih terus berkembang sejalan dengan penemuan data baru. Hal ini penting untuk mendapatkan simpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun secara keilmuannya

## F. Keabsahan Data

Kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu : (1) kepercayaan (*kreadibility*), (2) kebergantungan (*dependibility*), (3) kepastian (*konfemability*).

### 1. Kepercayaan (*kreadibility*)

Kreadibilitas data dimaksudkan untuk membuktikan data yang telah di kumpulkan bahwa data tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, ada beberapa teknik yang digunakan untuk menunjukkan kreadibilitas data yaitu

dengan teknik triangulasi, pengecekan sumber, pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, diskusi, dan pengecekan referensi.

## 2. Kebergantungan (*dependibility*)

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan audit dependability oleh dosen pembimbing.

## 3. Kepastian (*Certainty*)

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian dengan mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada pada pelacakan audit.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Atau Karakteristik Obyek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum**

Kabupaten Bulukumba terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak 153 Km dari Makassar (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan). Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Bulukumba terletak antara 05°20" - 05°40" LS dan 119°58" - 120°28" BT yang terdiri dari 10 Kecamatan dengan batas-batas yakni :

- a. Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Sinjai;
- b. Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone dan Pulau Selayar;
- c. Sebelah Selatan berbatasan Laut Flores;
- d. Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Bantaeng.

Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 Kecamatan yaitu, Kecamatan Ujung Bulu (Ibu Kota Kabupaten), Gantarang, Kindang, Rilau Ale, Bulukumpa, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang, dan Herlang. 7 diantaranya termasuk daerah pesisir sebagai sentra pengembangan pariwisata dan perikanan yaitu kecamatan ; Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Kajang dan Herlang. 3 Kecamatan sentra pengembangan pertanian dan perkebunan yaitu Kecamatan; Kindang, Rilau Ale, dan Bulukumpa.

Tabel 4.1 Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan Tahun 2014

KECAMATAN	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
		Administratif	
		(Ha)	(%) Total
Gantarang	20	17,351	15,03
Ujung Bulu	9	1,444	1,25
Ujung Loe	13	14,431	12,50
Bonto Bahari	8	10,860	9,41
Bonto Tiro	13	7,834	6,78
Herlang	8	6,879	5,96
Kajang	19	12,906	11,18
Bulukumpa	17	17,133	14,84
Rilau Ale	15	11,753	10,18
Kidang	13	14,876	12,88
Jumlah	70	115,467	100

*Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa*

Melihat luas wilayah Kabupaten Bulukumba perkecamatan dan jumlah desa perkecamatan luas kecamatan yang paling tertinggi Gantarang 17,351 Ha Jumlah Desa 20 luas wilayah Kecamatan Kajang Cuma 12,906 Ha sedangkan jumlah desanya tidak jauh beda dari gantarang yaitu 19 Desa.

#### **B. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Wisata Sumur Panjang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba**

Pengembangan pariwisata dengan pendekatan partisipasi masyarakat perlu mendapatkan perhatian, terutama dalam konsep pengembangan pariwisata jangka panjang. Pariwisata memang belum tergalikan secara optimal, padahal sektor ini mendapatkan banyak keuntungan, baik dari pasar domestik maupun pasar internasional. Bermodal berbagai kondisi alam wilayah yang dimiliki Indonesia, keragaman masyarakat dan berbudaya yang berkualitas, maka pengembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat dianggap potensial untuk dikembangkan agar dapat menjadi sektor andalan penerimaan devisa.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan ini dimaksudkan agar masyarakat tidak hanya berperan sebagai obyek melainkan sebagai subyek yang menggagas suatu rencana pengembangan obyek wisata di daerah mereka. Dalam perkembangannya, definisi dari perencanaan telah bergeser dari sekedar membuat rencana menjadi merencanakan yang sifatnya berkelanjutan yakni tidak hanya rencana pada saat memulai suatu kegiatan, akan tetapi juga merencanakan tahap-tahap pengembangan selanjutnya.

#### 1. Partisipasi dalam Tahap Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan terkait Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, yaitu

- a. ) masyarakat tidak hanya berperan sebagai obyek melainkan sebagai subyek

Dalam pengembangan obyek wisata sumur panjang yakni dimana diukur dari kehadiran dan keaktifan para masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan musyawarah serta diukur pula dari keaktifan dalam memberikan kritik dan masukan selama kegiatan pengembangan obyek wisata berlangsung, hal ini di

sampaikan oleh Camat Bontotiro Bulukumba mengatakan bahwa:

“Pemerintah daerah hal ini Camat Bontotirokami sampai Kesekolah-sekolah untuk mempromosikan wisata sumur panjang ini, kami juga menggandeng dara daeng untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa wisata sumur panjang satu dari beberapa tempat alternatif wisata yang ada di Kabupaten Bulukumba. Juga kami bekerja sama dengan media media online, dan radio untuk gencar mempromosikan wisata sumur panjang ini agar seluruh wisatawan mancanegara maupun lokal mengetahui bahwa wisata sumur panjang juga tidak kalah dengan wisata-wisata lainnya”(Hasil wawancara dengan AR 15 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam mengembangkan partisipasi masyarakat pemerintah setempat melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah-sekolah agar wisata sumur panjang lebih dikenal oleh masyarakat luas, serta pemerintah melakukan promosi di median-media lokal agar wisata sumur panjang di kenali berbagai wisatawan local maupun mancanegara.

Program pemerintahan penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara (Erliana Hasan). Aparatur pemerintah sebagai komunikator pemerintah yang terdiri dari tingkat bawah yakni Ketua Lingkungan sampai dengan tingkat tinggi yakni Presiden harus mampu mengkomunikasikan setiap apa yang ingin dikomunikasikan tentang komunikasi pemerintahan. seperti pula yang disampaikan oleh RJ selaku pengelola bahwa:

“ dengan adanya wisata sumur panjang dan adanya partisipasi masyarakat dalam mengembangkannya adalah hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan potensi wilayah yang ada di dikabupaten bulukumba khususnya bontotiro dan pemerintah juga akan sepenuhnya mendukung pengembangan tersebut . ”(Hasil wawancara RJ 20 Januari 2018)

apa yang dikemukakan oleh RJ merujuk kepada beberapa hal Sebagai tugas pokok pemerintahan untuk menjaga keamanan, ketertiban, keadilan, kesejahteraan

sosial, ekonomi, pekerjaan umum, dan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sudah mejadi hal yang paling vital agar pemerintah mempunyai komunikator pemerintah yang baik, jelas, tepat, akurat, menyeluruh, handal, profesional serta tangguh dan mampu bertindak cepat, tepat, efektif, efisien, dan bersinergi dalam upaya-upaya mengkomunikasikan komunikasi pemerintahan.

Wisata sumur panjang di Kabupaten Bulukumba Kecamatan Bontotiro menjadi salah satu dari yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat wisatawan Oleh karena itu, pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu daerah. Dengan adanya pariwisata, maka suatu daerah atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada, akan mendapatkan pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata. Pariwisata juga merupakan komoditas yang dibutuhkan oleh setiap individu, hal tersebut di atas kembali di pertegas oleh salah satu informan sebagai pengelola wisata sumur panjang mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak pengelola wisata sumur panjang dalam pengembangan wisata kami melakukan penambahan fasilitas-fasilitas serta mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan memperkenalkan wisata sumur panjang”(Hasil wawancara RJ 20 Januari 2018)

Hal tersebut di atas di pertegas kembali oleh salah satu informan dan sebagai pengelola wisata Sumur Panjang mengatakan bahwa:

“Kami dari pengelolah lebih memperhatikan kebersihan wisata serta berbagai fasilitas, menjaga ketertiban di lokasi wisata sumur panjang, mengikuti berbagai kegiatan festival yang di adakan pemerintah kabupaten bulukumba yang bekerja sama dengan berbagai lembaga-lembaga masyarakat”(Hasil wawancara dengan AN 20 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolah sumur panjang melakukan berbagai hal seperti menambah fasilitas serta mengikuti berbagai kegiatan masyarakat (festival) obyek

wisata sumur panjang dapat diketahui bersama bahwa para wisatawan mayoritasnya mengetahui obyek sumur panjang kabupaten Bulukumba ini dari sosial media, dan juga karena adanya festival skala nasional yang diadakan di kabupaten Bulukumba.

“Suara masyarakat dalam perencanaan pembuatan wisata sumur panjang masih jarang sekali di gunakan sebagai masukan,selama ini masyarakat hanya merima keputusan langsung dari pemerintah desa.keterlibatan perempuan juga tidak pernah ada di libatkan dalam kegiatan pengelolaan,terkecuali dalam hal kegiatan lainnya seperti kegiatan PKK,dan lain lain”(Hasil wawancara dengan SP 23 Januari 2018)

Pemerintah daerah untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan tersebut, mengingat bahwa kawasan wisata Sumur Panjang merupakan potensi yang sangat besar dalam menumbuhkan ekonomi daerah. Selain itu, kebesaran nama objek wisata Sumur Panjang pada tingkat nasional hingga internasional seharusnya menjadi pertimbangan besar oleh pemerintah setempat untuk lebih mengembangkan agar dapat lebih menarik wisatawan. Solusi-solusi yang dimaksud dalam hal ini adalah perencanaan dan perumusan strategi oleh pemerintah daerah terkait dengan pengembangan kawasan wisata Sumur Panjang agar dapat lebih berdaya saing dalam menarik wisatawan berdsarkan hasil wawancara dari toko masyarakat mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat khususnya dalam pengembangan wisata sumur panjang berjalan efektif dan efesien, bahkan dapat di lihat dan dikatakan kegiatan pengembangan wisata di kecamatan Bontotiro berjalan sesuai yang direncanakan oleh pihak pemerintah setempat dan masyarakat, ini terbukti dengan masyarakat turun terlibat langsung dalam pengembangan wisata di kecamatan Bontotiro”(Hasil wawancara dengan SD 23 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata sumur panjang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat langsung, ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melihat kinerja

pemerintah setempat sehingga masyarakat mampu berpartisipasi dengan cara memonitor kegiatan pengembangan wisata di kecamatan Bontotiro.

- b). masyarakat merencanakan pengembangan wisata yang sifatnya berkelanjutan

Pengembangan daya tarik wisata merupakan suatu rangkaian untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung akan kelangsungan pengembangan suatu objek wisata dapat berkembang di suatu tempat dan dasarnya karena tempat tersebut memiliki daya tarik yang mampu mengundang wisatawan untuk datang berkunjung hal ini pula dapat menjadikan wisata tersebut menjadi wisata yang terus berkembang dan berlanjut dalam hal pengembangannya gar tak hanya menjadi wisata jangka pendek, hal ini di sampaikan oleh salah satu informan mengatakan bahwa:

“Partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata sumur panjang melakukan melakukan kegiatan festival bersama pengelola serta bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam memperkenalkan wisata sumur panjang yang berada di Kabupaten Bulukumba Kecamatan Bontotiro”(Hasil wawancara dengan KW 23 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa obyek wisata sumur panjang kecamatan Bontotiro, kabupaten Bulukumba dapat diketahui bahwa pemerintah atau yang lebih spesifiknya dari kecamatan Bontotiro dalam membuat masyarakat atau wisatawan Pembuatan wisata sumur panjang.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan penulis dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah daerah untuk mencari solusi atas permasalahan-

permasalahan tersebut, mengingat bahwa kawasan wisata Sumur Panjang merupakan potensi yang sangat besar dalam menumbuhkan ekonomi daerah. Selain itu, kebesaran nama objek wisata Sumur Panjang pada tingkat nasional hingga internasional seharusnya menjadi pertimbangan besar oleh pemerintah setempat untuk lebih mengembangkan agar dapat lebih menarik wisatawan. Hal ini kembali disampaikan oleh salah satu informan yaitu KW bahwa:

“jika wisata sumur panjang bisa dikembangkan lebih besar lagi melihat beberapa peluang untuk solusi pengembangannya mengapa tidak apalagi hal itu dapat membuat wisatawan dapat terus tertarik agar tempat wisata itu menjadi terus berlanjut dan tak menjadi jangka pendek” (Hasil wawancara dengan KW 23 2018)

Dari penuturan KW sebagai salah satu informan menjelaskan bahwa beberapa masyarakat selain juga pemerintah menginginkan wisata tersebut terus dilakukan pengembangan mengingat potensi serta peluang di daerahnya.

## 2. Partisipasi dalam Tahap Pengelolaan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata Sumur Panjang diukur dari :

### a). partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana

dalam memberikan pelayanan bagi wisatawan Tingkat partisipasi masyarakat diklasifikasikan berdasarkan keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan yang menjadi tolok ukur tingkat partisipasi mereka dalam pengelolaan. Hasil wawancara Camat Bontotiro mengatakan bahwa:

“Dalam pengembangan wisata peran masyarakat merupakan sebuah bentuk kerjasama dimana masyarakat mampu mengembangkan potensi di daerahnya, salah satunya partisipasi masyarakat dalam pola fungsionalnya. Pelaksanaan keputusan yang dilakukan antara masyarakat, investor dan pemerintah daerah khususnya dinas pariwisata merupakan

sebuah wadah kerjasama yang baik untuk pembangunan pengembangan wisata”(Hasil wawancara dengan AR 15 Januari 2018)

Wawancara di atas menunjukkan bahwa dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam bentuk memutuskan pembangunan khususnya dalam pengembangan wisata yang ada di kecamatan Bontotiro tergolong tinggi dalam memberikan saran atau pendapatnya. Biasanya masyarakat yang sering memberikan saran atau pendapatnya masyarakat yang sering mengikuti rapat karena dia mempunyai kemampuan berbicara didepan umum. Selain itu, karena adanya kesadaran pribadi untuk membantu terlaksananya pembangunan pengembangan wisata.

Kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Hubungan terjadi dalam setiap proses kehidupan manusia. Hubungan dapat dibedakan menjadi hubungan dengan teman sebaya, orangtua, keluarga, dan lingkungan sosial. Secara garis besar, hubungan terbagi menjadi hubungan positif dan negatif. Hubungan positif terjadi apabila kedua pihak yang berinteraksi merasa saling diuntungkan satu sama lain dan ditandai dengan adanya timbal balik yang serasi. Sedangkan, hubungan yang negatif terjadi apabila suatu pihak merasa sangat diuntungkan dan pihak yang lain merasa dirugikan. Dalam hal ini, tidak ada keselarasantimbal balik antara pihak yang berinteraksi. Lebih lanjut, hubungan dapat menentukan tingkat kedekatan dan kenyamanan antara pihak yang berinteraksi, pada pengelolaan wisata perlunya kerja sama antar pemerintah dan masyarakat setempat hal ini di jelaskan oleh Toko Masyarakat mengatakan bahwa:

“Kami melihat masyarakat Ketika tiba di Kecamatan Bontotiro, kebanyakan masyarakat pengunjung itu lebih awal berziarah ke makam Datotiro setelah itu mereka ke kolam hila-hila untuk berendam. Katanya sekaligus pembersihan diri, terkait dari partisipasi pemerintah terhadap lokasi wisata kami serahkan ke pengelola”(Hasil wawancara dengan SD23 Januari 2018)

Dalam hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masih ada beberapa masyarakat yang belum begitu mengetahui bebrapa titik tempat waisata kemudian bebrapa msyarakat yang bersikap acuh tak melakukan komunikasi dengan pemerintah atau dalam hal ini pengelola terkait peembangan pengunjung wisata hal inilah yang perlu pula menjadi bahan pertimbangan pemerintah mengenai partisipasi masyarakat untuk keikutsertaannya dalam mengembangkan sarana wisata.

Masyarakat Bulukumba khususnya di Bontotiro, mempromosikan wisata Sumur Panjang ini terutama melalui sosial media, sehingga memungkinkan orang dari berbagai daerah mengenal obyek wisata ini yang dapat menambah jumlah pengunjung yang datang.Seperti yang ditegaskan oleh salah satu informan dari pengelola wisata bahwa:

“Yang berperan dalam pengelolaan pariwisata adalah seluruh masyarakat, ada apa-apa ya kami tanggung bersama, yang tanggung jawab bukan hanya yang membuat dan membuka jalur, tapi seluruh masyarakat semua ikut bertanggung jawab, saat ada sesuatu yang terjadi masyarakat dilibatkan secara penuh baik dari gagasan, tenaga ataupun dana yang lain. Manfaat yang dirasakan , yang pertama banyak teman, untuk masalah hasil tidak terlalu memikirkan, biar pada tahu kalau disini ada potensi pariwisata sumur panjang, dulunya orang-orang terutama luar kota belum pada tahu kecamatan Bontotiro dan sekarang saya bersyukur karena sudah banyak orang yang tau tempat ini, kalau disini ada potensi seperti ini, kita cuma ingin mengenalkan budaya-budaya yang ada disini. pengenalan pada masyarakat luas. Dengan cara menggunakan sosial media”(Hasil wawancara RJ 20 Januari 2018).

b). Keikutsertaan dalam memberikan pelayanan

Selain itu, wisata Sumur Panjang memiliki beberapa unit pengelola yang memiliki peran untuk mengelola dan melayani wisatawan serta fungsinya untuk mendukung keberlangsungan kegiatan kepariwisataan di dalam wisata Sumur Panjang. Unit-unit tersebut di antaranya berupa unit loket yang bertanggung jawab untuk tempat pembayaran masuk obyek wisata, unit prasarana yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan seluruh fasilitas didalam obyek wisata, unit kebersihan yang berfungsi untuk menjaga kebersihan seluruh lingkungan obyek wisata, serta pengelola lahan parkir, hal ini juga disampaikan oleh pengelola sumur panjang mengatakan bahwa:

“Kami dari pengelola wisata itu mengacu pada kebijakan pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dan Dinas Parawisata, kami dari pengelolah pada pengembangan wisata sumur panjang, di wisata tersebut juga terletak makan Dato'tiro hal ini membuat pengelolah mengecu pada kebijakan pemerintah setempat”(Hasil wawancara dengan AN 20 2018)

Semakin meningkatnya kelengkapan fasilitas prasarana dan kualitas pelayanan di dalam wisata Sumur Panjang inilah yang menjadi salah satu alasan dan daya tarik bagi pengunjung untuk datang, hal ini di sampaikan oleh masyarakat mengatakan bahwa:

“Kami masyarakat yang di pakai atau masukan dari masyarakat dalam pengelolaan maupun perencanaan mungkin masih sangat jarang, belum ada saya di undang rapat untuk mengikuti kegiatan mengenai alokasi dana desa .atau penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa pemerintah desa selama ini telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat terlibat ataupun berpartisipasi dimana mereka di beri kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya langsung kepada pemerintah desa, tetapi yang terjadi justru sebaliknya dimana aspirasi masyarakat masih jarang di pakai sebagai masukan ataupun pedoman dalam kegiatan perencanaan alokasi dana atau pembuatan sumur panjang”(Hasil wawancara dengan SP 23 Januari 2018)

Menurut salah satu tokoh masyarakat Supardi kemampuan masyarakat untuk mengembangkan potensi daerahnya khususnya pada pembangunan pengembangan wisata merupakan sebuah hasil kerjasama pemerintah daerah, dimana dapat kita lihat tempat wisata sumur panjang yang terletak di kecamatan Bontotiro kini sudah sesuai yang diharapkan masyarakat, sekalipun masih mengambang, hal ini di pertegas oleh salah satu informan dari toko masyarakat mengatakan bahwa:

“Kami dari masyarakat pada partisipasi pengembangan parawisata sumur panjang kecamatan bontotiro, ya itu tergantung dari pengelolanya sebagai sebuah usaha pengelola dalam mengembangkan wisata tersebut untuk pertumbuhan dan kembangnya kekuatan wisata untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan wisata yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan.”(Hasil wawancara dengan KW 23 Januari 2017)

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan penulis dapat menyimpulkan bahwa Semakin meningkatnya kelengkapan fasilitas prasarana dan kualitas pelayanan di dalam wisata Sumur Panjang inilah yang menjadi salah satu alasan dan daya tarik bagi pengunjung untuk datang, Pariwisata kini telah menjadi salah satu dari industri gaya baru, yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di dalam negara penerima wisatawan Oleh karena itu, pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara. Dengan adanya pariwisata, maka suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada, akan mendapatkan pemasukan dari pendapatan setiap objek wisata

### 3. Partisipasi dalam Tahap Pemanfaatan

#### a. Adanya pendistribusian hasil

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan ini terdiri manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari adanya pengembangan obyek wisata Sumur Panjang dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga; serta pendapat masyarakat tentang manfaat pengembangan tersebut bagi lingkungan di sekitar obyek wisata, sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Camat Bontotiro mengatakan bahwa:

“Kami dari pemerintah melihat sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan wisata dan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama wisata dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh wisata sumur panjang” (Hasil wawancara dengan AR 15 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dinas pariwisata menyerankan sepenuhnya pada pengelolah wisata sumur panjang dalam pengembangan pariwisata Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu pola untuk membuat rencana dengan mengamati dan memperkirakan keadaan lingkungan internal dan eksternal untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Camat Kecamatan Bontotiro Bapak H.A. Ansar S.Sos, MM menyatakan bahwa pengembangan wisata sumur panjang sangat meningkat, karena ini semua tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang sangat baik. Masyarakat Kecamatan Bontotiro kini sudah mulai menikmati hasil dari pembangunan ataupun pengembangan wisata yakni masyarakat mampu lebih mandiri khususnya di sektor ekonomi. sebagaimana yang diungkapkan oleh SP bahwa:

“setelah meningkatnya wisata sumur panjang peningkatan ekonomi di beberapa masyarakat mulai meningkat karna hal tersebut tak disia-siakan masyarakat dalam mengembangkan beberapa usaha yang juga membantu

minat wisatawan untuk berkunjung. (Hasil wawancara dengan SP 23 Januari 2018)

Dari ungkapan responden diatas dapat dilihat bahwa peningkatan wisatawan dapat memberikan dampak yang baik kepada masyarakat setempat, ini berarti bahwa terjadi interaksi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah setempat sehingga pembangunan dalam pengembangan wisata sumur panjang dapat terwujud melalui partisipasi masyarakat yang tinggi, Tokoh masyarakat menyampaikan bahwa:

“Kalau itu kerja yang pembangunan sarana dan prasarana pariwisata. Kalau peningkatkan pemasaran biasanya promosi, pameran ada juga menjual. Kalau yang pembinaan kebudayaan dan kesenian lebih cenderung ke pelatihan kesenian dengan pementasan kesenian, program yang terkait langsung dengan kepariwisataan. Untuk pengembangan destinasi pariwisata, untuk peningkatan pemasaran pariwisata, dengan pembinaan kebudayaan dan kesenian”(Hasil wawancara dengan SD23 Januari2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pengembangan pemasaran pariwisata dirumuskan dengan tujuan untuk meningkatkan pemasaran yang kreatif, inovatif, dan efektif. Pengembangan tersebut kemudian dijabarkan dan direalisasikan dengan berbagai kegiatan yang di laksanakan oleh pengelola wisata sumur panjang.

Tingkat kunjungan wisatawan mempengaruhi jumlah pendapatan yang mampu dihasilkan oleh suatu obyek wisata. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan belum tentu akan dapat meningkatkan pula jumlah pendapatan bagi obyek wisata itu sendiri hal ini terjadi dapat dilihat dari selisih angka kenaikan dari tahun berikutnya apakah cukup signifikan atau tidak, apabila jumlah angka tersebut menunjukkan angka kenaikan yang cukup signifikan maka sudah pasti

jumlah pendapatan yang didapatkan dari tahun ke tahun tentu akan semakin meningkat. Berlaku juga sebaliknya apabila selisih angka kenaikan kunjungan wisatawan tidak terlalu besar maka jumlah pendapatan dari tahun ke tahun tentunya akan mengalami kecenderungan seimbang bahkan penurunan terlepas dari berbagai faktor internal didalamnya yang mempengaruhinya.

b). tingkat keseimbangan distribusi hasil

Perkembangan yang telah dialami wisata Sumur Panjang sebagai hasil dari kegiatan pengembangan pariwisata dalam kawasan tersebut tidak hanya cukup dirasakan manfaatnya bagi beberapa kelompok atau golongan saja namun seluruh lapisan masyarakat juga ikut merasakan dampak positif dari adanya kegiatan pengembangan obyek wisata yang berada didaerah mereka. Karena dengan semakin berkembangnya obyek wisata yang ditandai dengan banyaknya kunjungan wisatawan dan pendapatan yang mampu dihasilkan oleh obyek wisata tersebut juga akan membawa manfaat positif yakni mendorong kemajuan ekonomi masyarakat pelaku wisata sehingga apa yang menjadi tujuan utama pengembangan obyek wisata yakni meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat lokal dapat terpenuhi, hal ini di sampaikan oleh pengelola wisata sumur panjang mengatakan bahwa:

“Kami Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dan masyarakat bidang kebudayaan dan kepariwisataan dapat dicapai melalui tiga program pengembangan kemitraan, Kemudian program tersebut dijabarkan atau didukung oleh tiga kegiatan di antaranya, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah dan Kegiatan Pengembangan SDM di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama dengan Lembaga lainnya ”(Hasil wawancara dengan RJ 20 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Pengembangan wisata Sumur Panjang juga memunculkan berbagai dampak. Berbagai dampak yang dimunculkan dalam kegiatan pengembangan Wisata Sumur Panjang secara garis besar telah dibedakan menjadi dua yakni dampak ekonomi dan dampak lingkungan, melihat hal tersebut toko masyarakat menyampaikan dalam pengelolaan wisata sumur panjang di kecamatan Bontotiro

Semakin banyaknya wisatawan yang datang untuk berwisata didalam kawasan wisata ini terlepas dari daya tarik utamanya yakni kejernihan airSumur Panjang yang ditunjang dengan alamnya yang sangat sejuk dan menarik sehingga menjadikan wisata Sumur Panjang sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang menjadi unggulan untuk Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, hal tersebut di atas di pertegas kembali oleh salah satu informan dari pengelola wisata sumur panjang mengatakan bahwa:

“kalo kami ditanya tentang pemanfaatan kami selalu utamakan kesenangan kami tentunya berupaya semaksilmungkin untuk membuat wisatawan yang berkunjung kesana dengan cara melengkapi fasilitas-fasilitas yang ada di sana, untuk tahun ini disana sudah outbound” (Hasil wawancara dengan AN 20 Januari 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwasalah satu cara untuk menyenangkan wistawan, pengelola wisata sumur panjang menambahkan fasilitas-fasilitas penunjang, seperti tempat tidur, dan sarana dari yang awalnya hanya villa, sekarang isi-isi atau perabotannya sudah ada, tanpa keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat lokal secara langsung dalam kegiatan pengembangan pariwisata pada suatu daerah yang didalamnya terdapat sumber daya potensial untuk dikembangkan, dirasa akan

cukup sulit bagi obyek wisata tersebut untuk berkembang, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Kami dari masyarakat melihat pengembangan wisata sumur panjang tidak begitu maksimal dalam pengembangan yang dilakukan oleh pihak pengelola wisata sumur panjang dan pemerintah setempat karena masih kurangnya fasilitas-fasilitas yang berada di sekitar wisata sumur panjang di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba”(Hasil wawancara dengan KW 23 Januari 2018)

Dengan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat sekitar untuk terlibat langsung dalam seluruh kegiatan kepariwisataan didalam obyek wisata tersebut selain berperan untuk dapat memajukan obyek wisata itu sendiri, masyarakat sekitar lah yang nantinya juga akan ikut merasakan langsung hasil yang diperoleh dari keberhasilan pengembangan wisata Sumur Panjang yang berada di daerah mereka, hal tersebut disampaikan oleh tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Dalam setiap perumusan kebijakan, pemerintah desa perlu mendengarkan suara aspirasi masyarakat dan kemudian di pakai sebagai masukan ataupun di jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Pemerintah desa juga harus memberikan ruang kepada masyarakat dapat ikut bersuar aspirasi, memiliki akses untuk terlibat dalam setiap pengembangan wisata sumur panjang” (Hasil wawancara dengan SP 23 Januari 2018)

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan penulis dapat menyimpulkan bahwa Keterlibatan masyarakat di Kecamatan Bontotiro dalam kegiatan kepariwisataan di lingkungan mereka, baik itu sebagai pedagang dan pengelola lahan parkir merupakan suatu bentuk keputusan yang telah mereka pilih untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan kepariwisataan di daerah mereka sekaligus sebagai bentuk dukungan mereka untuk keberlangsungan kegiatan kepariwisataan didalam obyek wisata Sumur Panjang tersebut, Sedangkan dampak lingkungan dari kegiatan pengembangan wisata Sumur Panjang adalah dapat menumbuhkan rasa untuk lebih mencintai potensi sumber

daya yang ada di Kecamatan Bontotirodan memanfaatkannya secara bijak guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh masyarakat di Kecamatan Bontotiro, hal ini juga di sampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

### **C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Untuk Ikut Berpartisipasi Dalam Pengembangan Wisata Sumur Panjang**

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan tidak hanya merupakan usaha pemerintah semata atau masyarakat saja, akan tetapi suatu kegiatan bersama yang hasilnya diharapkan dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat oleh pemerintah, karena masyarakat merupakan obyek dari adanya pembangunan. Di lain pihak, partisipasi masyarakat juga ditentukan oleh adanya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Dalam pengembangan pariwisata khususnya pariwisata Sumur Panjang yang ada di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba sendiri, tentu dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat. Besar kecilnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu faktor penghambat maupun faktor pendorong.

#### **1. Faktor Pendukung**

Terdapat beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunan, yaitu:

Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan representatif. Namun secara garis besar dapat dikelompokkan dua jenis yaitu; partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud), misalnya keterampilan dan sosial. Sedangkan kedua adalah bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata, misalkan partisipasi buah pikiran, sosial dan representatif.

a. Sosial

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini merupakan salah satu faktor pendorong masyarakat dalam mengembangkan pariwisata sumur panjang yang ada di kecamatan Bontotiro, yaitu adanya:

“Kami temui salah satu faktor yang membuat wisatawan datang adalah sebagai bentuk penasaran mereka dengan suatu cerita tentang latar belakang adanya sumur panjang di bontotiro. dan juga merupakan cara mereka untuk merefleksi pikiran yang membuat mereka merasa penat di rumah ataupun di tempat kerjanya. terutama oleh kalangan mahasiswa, tempat ini merupakan sarana bagi mereka untuk di jadikan sebagai destinasi dalam mereflesi kembali betapa ala mini sungguh mengsilkan panorama yang begitu indah dan damai di tempat” (Hasil wawancara dengan AR 15 Januari 2018)

Pariwisata, ada banyak aktor yang berperan dalam menggerakkan sistem. Aktor tersebut adalah insan-insan pariwisata yang ada pada berbagai sektor. Secara umum, pariwisata dikelompokkan dalam tiga pilar utama, yaitu (1) masyarakat, (2) swasta, (3) pemerintah. Yang termasuk masyarakat adalah masyarakat umum yang ada pada destinasi, sebagai pemilik dari berbagai sumber daya yang merupakan modal pariwisata, seperti kebudayaan. Termasuk kedalam kelompok masyarakat ini juga tokoh-tokoh masyarakat, intelektual, LSM, dan media massa

Diungkapkan oleh pengunjung wisata sumur panjang yakni toko masyarakat mengatakan bahwa:

“Alasan saya ikut berpartisipasi ya karena suka/ hobi obyek wisata salah satunya wisata sumur panjang yang berada di daerah saya, kebetulan pertama kali saya obyek wisata sumur panjang ini, disambut baik sama pengelola, bagus positif, ada ruang untuk saya mengembangkan, ya saya ikut mengembangkan. Selain itu juga bisa menambah relasi untuk mempromosikan obyek wisata yang berada di Kabupaten Bulukumba khususnya obyek wisata sumur panjang ini yang terletak di Kecamatan Bontotiro..”(Hasil wawancara dengan SD 23 Januari 2018)

Hal tersebut menunjukkan bahwa relawan ikut berpartisipasi dikarenakan adanya sebuah pengakuan dan penghargaan ataupun kesempatan untuk ikut andil dalam pengembangan pariwisata yang ada. Alasan lain yang mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi adalah

“Ini juga merupakan aset desa yang memungkinkan mendapatkan keuntungan yang lebih bagi masyarakat sekitar terutama warga desa hila hila. Dari sektor wisata ini yang justru membuat masyarakat merasa sadar untuk ikut serta peduli dalam memasarkan objek wisata ini, sebagai destinasi yang diminati oleh para pengunjung”(Hasil wawancara dengan RJ 20 Januari 2018)

Hal tersebut di atas di pertegas kembali oleh salah satu pengelola sumur panjang mengatakan bahwa:

“Kami tertarik pada wisata sumur panjang karena adanya makam Datotiro di lokasi wisata tersebut dan alam sekitar di tambah lagi dengan masyarakat memasarkan centra mata khas bulukumba, serta partisipasi masyarakat pada pengembangan wisata tersebut tidak lagi di ragukan”(Hasil wawancara dengan AN 20 Januari 2018)

Wisatawan adalah konsumen atau pengguna produk dan layanan. Wisatawan memiliki beragam motif dan latar belakang (minat, ekspektasi, karakteristik social, ekonomi, budaya, dan sebagainya) yang berbeda-beda dalam melakukan kegiatan wisata. Setiap masyarakat berpartisipasi karena adanya tuntutan lingkungan untuk saling gotong royong. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Arman, bahwa masyarakat berpartisipasi karena tuntutan lingkungan yang masih kental dengan adat gotong royong.

“Pemerintah kabupaten ingin menggunakan ajang itu untuk menarik lebih banyak wisatawan lokal, Selain itu akan ada ritual, partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di lakukan oleh pihak wisata sumur panjang Kabupaten Bulukumba”(Hasil wawancara dengan SP23 Januari 2018)

Setiap masyarakat menginginkan Kecamatan Bontotiro menjadi Kecamatan yang lebih baik dan maju sehingga Kecamatan Bontotiro yang berada di pelosok ini bisa dikenal oleh masyarakat luas. Sikap saling menghargai yang ada di Kecamatan Bontotiro membuat masyarakat tanpa canggung untuk ikut berpartisipasi sesuai dengan kemampuan warga masing-masing. Hal ini terlihat berdasarkan pengamatan penulis saat rapat-rapat rutin maupun kegiatan lainnya, dimana satu sama lain bisa saling menghargai pendapat masing dan diputuskan berdasarkan musyawarah.

“Kami sependapat dengan pemerintah setempat dan pengelola wisata sumur panjang, ketika pemerintah membangun wisata sumur panjang karena dapat membantu masyarakat setempat dari segi ekonomi, masyarakat dapat menjual cendras mata khas Kabupaten Bulukumba (penghasilan tambahan),”(Hasil wawancara KW 23 Januari 2018)

Manfaat yang dirasakan saat masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata Sumur Panjang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat setempat seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini diungkapkan kembali oleh Pak Arman, bahwa masyarakat sudah merasakan hasil dari adanya pengembangan wisata sumur panjang, kualitas hidup mereka kehidupan mereka membaik begitu pula dengan ekonomi, (01/2018). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat ikut merasakan manfaat dari adanya partisipasi pengembangan wisata Sumur Panjang tersebut.

## b. Keterampilan

Salah satu partisipasi masyarakat yang dapat menjadi faktor pendukung pengembangan wisata di kecamatan bontotiro yaitu keterampilan. Dalam berbagai hal keterampilan yang dimaksud dalam pengembangan wisata yaitu sebagai bentuk upaya untuk lebih mengembangkan wisata yang ada didaerahnya terkhusus wisata sumur panjang di kecamatan bontotiro.

Salah satu bentuk keterampilan masyarakat yang diperlukan yakni keterampilan dalam hal social pula sebagai bentuk partisipasi untuk lebih meningkatkan pariwisata sumur panjang yang ada di kecamatan bontotiro melakukan berbagai interaksi terkhusus kepada masyarakat umum melakukan interaksi social yang baik dapat memberikan beberapa kenyamanan tersendiri bagi wisata terkhusus pada masyarakat disekitar destinasi yang memiliki kesadaran dan kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu informan yang mengatakan bahwa:

“beberapa masyarakat yang tinggal di daerah destinasi telah memiliki kesadaran untuk melakukan interaksi dengan wisatawan utuk lebih menarik minat mereka berkunjung berusaha membuat bdaya ramah apalagi memang ada beberapa orang yang memliki keterampilan interaksi social yang baik. .”(Hasil wawancara dengan SD 23 Januari 2018)

Apa yang telah diungkapkan oleh SD selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa beberapa masyarakat yang memiliki keterampilan interaksi social pasti dengan adanya kesadaran atau tidak telah melakukan partisipasi masyarakat dalam peningkatan pengembangan objek wisata sumur panjang tersebut. RJ selaku pengelola mengungkapkan bahwa:

“Kesadaran masyarakat dalam melakukan pengembangan terutama interaksi social sepertinya tak perlu diimbaukan lagi karna hal tersebut tanpa mereka sadarai dan dengan adanya perlakuan baik mereka terhadap wisatawan

yang berkunjung ke destinasi telah mereka lakukan. .”(Hasil wawancara dengan RJ 23 Januari 2018)

Keterampilan sosial yang berupa interaksi yang dilakukan baik oleh individu ke individu, individu ke kelompok dan kelompok ke kelompok telah menjadi suatu hal yang terjadi dikalangan masyarakat sehingga hal ini menjadi sebagai faktor yang benar-benar mendukung pengembangan destinasi wisata dan hal lainnya dikalangan masyarakat. Hal serupa juga diungkapkan oleh AN yang mengatakan bahwa:

“kesadaran masyarakat akan hal itu sedikit membantu kami dalam membantu mengembangkan destinasi wisata sumur panjang kami tidak perlu melakukan terlalu banyak himbauan karna masyarakat sendiri telah sadar akan hal itu” Hasil wawancara dengan RJ 23 Januari 2018)

Tak sedikit banyak masyarakat yang memiliki kemampuan interaksi seperti yang mampu mengarahkan serta mampu berbicara didepan umum beberapa masyarakat justru masih ada yang acuh akan partisipasi alam pengembangan destinasi wisata sumur panjang di kecamatan bontotiro terutama yang tak bertempat tinggal di sekitaran destinasi namun hal itu diharapkan tak menjadi penghambat dalam pengembangan obyek wisata sumur panjang tersebut.

## 2. Faktor Penghambat

Dari hasil penelitian dapat diketahui beberapa faktor penghambat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut

### a. Latar belakang pekerjaan

Masing-masing individu memiliki kesibukan dan pekerjaan yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi atau menghambat pengembangan pariwisata masyarakat berikut paparan salah satu informan yang mengatakan bahwa:

“Faktor yang menghambat adalah karena masyarakat memiliki profesi dan kesibukan masing-masing, jadi masyarakat itu tidak bisa ikut secara penuh andil dalam pengelolaan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengelola.”(Hasil wawancara dengan SD 23 Januari 2017)

Kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang pengembangan wisata yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah membuat warga tidak bisa berpartisipasi secara maksimal dalam pengelolaan dan perawatan pariwisata yang ada. Hal ini terlihat berdasarkan peneliti saat ditanya mengikuti rapat/kegiatan pengembangan pariwisata sumur panjang, banyak yang kurang begitu paham, dan kebanyakan kegiatan untuk pengelolaan sendiri masih belum ada seperti bagaimana manajemen pariwisata atau pelatihan tentang konservasi. Kebanyakan yang membuat kegiatan adalah pihak luar, seperti komunitas-komunitas atau organisasi pecinta alam lainnya yang dibantu oleh relawan.

“Kami dari pemerintah kecamatan menegaskan bahwa ada beberapa kekurangan di wisata tersebut seperti, kurangnya fasilitas yang tidak terurus di antaranya vila dan kurangnya air bersih dikarenakan petugas kebersihan yang terbatas tetapi kami dan pemerintah Kabupaten Khususnya Dinas Pariwisata akan memperbaiki dalam waktu dekat ini akan menambahkan beberapa fasilitas”(Hasil wawancara AR 15 Januari 2018)

Kesulitan berkomunikasi dengan bahasa asing saat ada wisatawan dari mancanegara, yang membuat kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh rendahnya pendidikan sebagian masyarakat Kecamatan Bontotiro.

“Kami sebagai masyarakat ketika ditanya apa faktor penghambat kekurangan yang ada di wisata sumur panjang, mungkin karna kebersihannya terus di tambah lagi dengan fasilitas lainnya yang masih kurang lengkap”(Hasil wawancara KW 23 Januari 2018)

Hal ini terlihat berdasarkan hasil wawancara saat terjadi interaksi antara wisatawan asing dengan warga setempat. Selain itu peneliti juga menerima

keluhan dari masyarakat setempat kalau mereka tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa asing, Hal ini terlihat berdasarkan peneliti saat ditanya mengikuti rapat/kegiatan pengembangan pariwisata sumur panjang, banyak yang kurang begitu paham, dan kebanyakan kegiatan untuk pengelolaan sendiri masih belum ada seperti bagaimana manajemen pariwisata atau pelatihan tentang konservasi.

“Kami masyarakat belum merasa betapa untungnya ketika objek wisata inidi kelola sedimikian rupa,sehingga orang luar merasa tertarik dengannya. Mulai dari segi ceritanya,maupun dari segi keindahannya. Partisipasi dalam perencanaan dalam tahap pengelolaan mereka masih secara sepenuhnya mengharapkan dan mengandalkan pemerintah,sadar akan manfaatnya mereka tak tersentuh dalam memori mereka.Sehingga para pengelola yang ditugaskan oleh pemerintah setempat pun merasa sulit jikalau hanya mengelola sencara sendiri, karena merasa terhambat”(Hasil wawancara dengan SP 23 Januari 2018)

b). Penyempatan waktu untuk ikut berpartisipasi menjadi berbeda-beda

Keikutsertaan atau keterlibatan dimaksud disini bukanlah yang bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakat, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Dengan demikian partisipasi merupakan peran aktif atau tidak aktifnya anggota dalam melakukan kegiatan. Partisipasi bermakna mengambil bagian atau ikutserta dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola wisata sumur panjang mengatakan bahwa:

“Disini fasilitas yang memikat sehingga pengunjung merasa betah belum memadai,fasilitas yg di gunakan oala kadarnya saja.trasnportasi yg khusus digunakan oleh pengelola untuk akses ketempat wisata belum ada” (Hasil wawancara dengan RJ 20 Januari 2018)

Di pertegas kembali oleh salah satu informan dari pengelola wisata sumur panjang mengatakan bahwa:

“Kami dari pengelola wisata sumur panjang mengakui bahwa masih kurangnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat serta pihak pengelola wisata sumur panjang sehingga fasilitas yang ada di wisata masih kurang memadai hal ini lah yang menjadi kekurangan wisata sumur panjang yang berada di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba” (Hasil wawancara dengan AN 20 Januari 2018)

Berikut pula dengan hal-hal lain yang menjadi banyak pertimnagan terkait keikutsertaan masyarakat dalam menyempatkan waktunya meski memiliki profesi yang menuntut waktu ekstra. bekerjasama dengan pemerintah akan menjadi sedikit alternative dalam sumbangsi partisipasi terhadap pengembangan wisata tersebut. berikut pula yang diungkapkan oleh KW bahwa:

“ masyarakat yang memiliki kesibukan serta tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi minimal melakukan kemitraan dalam bentuk apapun kepada pemerintah untu mendukung pengembangan wisata sumur panjang agar tak terlalu menjadi salah satu penghambat pengembangannya” (Hasil wawancara dengan KW 20 Januari 2018)

Sedangkan pola partisipasi masyarakat yang bersifat kemitraan lebih menghargai masyarakat dengan memberikan posisi yang sama dengan kelompok pengambilan keputusan. Karena diposiskan sebagai mitra kedua kelompok tersebut membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah, dan pembuat keputusan. Dengan adanya konsep ini maka ada upaya pendistribusian kewenangan pengambilan keputusan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan meliputi:

1. Masyarakat sudah ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata Sumur Panjang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, baik dalam tahap perencanaan, pengelolaan maupun tahap pemanfaatan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan terkait pengembangan obyek wisata Sumur Panjang dapat dilihat dari kehadiran dan keaktifan mereka dalam kegiatan sosialisasi dan musyawarah serta keaktifan masyarakat dalam memberikan kritik dan saran atau masukan selama kegiatan pengembangan obyek wisata berlangsung. Partisipasi masyarakat dalam tahap pengelolaan terlihat dari keikutsertaan mereka dalam kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pengelolalaanya, keikutsertaan mereka dalam memberikan pelayanan bagi wisatawan dan keikutsertaan dalam mempromosikan obyek wisata. Manfaat partisipasi yang dirasakan masyarakat dalam pengembangan wisata Sumur Panjang adalah ekonomi masyarakat Kecamatan Bontotiro menjadi meningkat, lingkungan dan obyek wisata Sumur Panjang menjadi lebih terawat, dan wawasan masyarakat menjadi meningkat.
2. Faktor yang mempengaruhi masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengembangan wisata Sumur Panjang terdiri atas faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong masyarakat dalam mengembangkan wisata Sumur Panjang di Kecamatan Bontotiro, meliputi: 1) masyarakat diberikan

kesempatan;2) adanya tuntutan lingkungan untuk saling gotong royong; 3) sikap saling menghargai; dan 4) manfaat yang dirasakan untuk peningkatan kesejahteraan. Faktor penghambat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata adalah sebagai berikut: 1) latar belakang pekerjaan masing-masing individu yang berbeda-beda membuat kesibukan individu berbeda-beda dan penyempatan waktu untuk ikut berpartisipasi menjadi berbeda-beda; 2) kurangnya pengetahuan dan wawasan tentang pengembangan wisata yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah; dan 3) kesulitan berkomunikasi dengan bahasa asing saat ada wisatawan dari mancanegara.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan, diantaranya:

1. Dalam rangka pengembangan wisata, sebaiknya masyarakat Kecamatan Bontotiro perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak tidak hanya pihak pemerintah saja namun diperlukan memperbanyak kerjasama dengan pihak swasta agar bisa lebih mengembangkan kualitas dan manfaat dari adanya pariwisata sumur panjang di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk meningkatkan mutu dan pelayanan sebaiknya masyarakat Kecamatan Bontotiro semakin giat dan sering mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh pengurus ataupun pihak lain yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata Sumur Panjang guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan alam dan juga meningkatkan kreatifitas agar bisa menampilkan produk-produk wisata lainnya yang dimiliki sebagai potensi wisata di Kecamatan Bontotiro.

3. Pihak penyelenggara ataupun pemerintah lainnya hendaknya memfasilitasi dan memberikan kemudahan-kemudahan yang diperlukan untuk merealisasikan gagasan-gagasan masyarakat dalam hal pengembangan pariwisata.
4. Dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada untuk pengembangan pariwisata Sumur Panjang di Kecamatan Bontotiro maka diperlukan kreativitas pengurus maupun anggota untuk terus mengembangkan prestasi. Pendekatan multipihak dengan melibatkan semua pihak, dapat menyelaraskan persepsi tentang tujuan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dimana salah satu tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif. 2012. *Peran Dan Fungsi Pemerintah*. Pada 12 Februari. [Http//Arifgil.Com/2012/112/Peran](http://Arifgil.Com/2012/112/Peran). 20 April 2017. 19. 42. S
- Biantoro, R dan Ma'rif, S. 2014. *Pengaruh Pariwisata Terhadap Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat pada Kawasan Objek Wisata Candi Borobudur Kabupaten Magelang*. *Jurnal Teknik PWK*, 3 (4): 1038-1047.
- Dewartoto, Argyo. 2010. *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Surakarta: 11 Maret University Press.
- Dewi, M.H.U. 2013. *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali*. *Kawistara*, 3 (2): 117-226.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ernawati, N.M. 2011. *Pengaruh Pariwisata Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Pesisir*. *Sabda*, 6 (1): 69-74.
- Hamzah, A. 2015. *Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan Melalui Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan*. *Jurnal Kepariwisata*, 9 (2): 01-11.
- Irianto, A. 2003. *Dampak Pariwisata terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Sumatra Barat*. Padang: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.
- Kariange, Hendra 2011. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT Alumni.
- Kurniawan, F., Zauhar, S., & Hermawan. 2013. *Kemitraan Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi Pada Tirta Wisata Kabupaten Jombang)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1 (1): 47-55.
- Mardikanto. 2003. *Pengertian Partisipasi dan Komunikasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Meray, J.G. 2016. *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Pariwisata Pantai Mahembang Kecamatan Kakas*. *Ejournal Unsrat*, 3 (3): 47-55.
- Luthfi. 2013. *Pariwisata Sumur Panjang*. Yogyakarta:
- Nawawi, A. 2013. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangtritis*. *Jurnal Nasional Pariwisata*, 5 (2): 103-109.

- Ndraha, T. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prabowo, S.E., Hamid, D., & Prasetya, A. 2016. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)*. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 33 (2): 18-24.
- Prety. 2011. *Karakteristik Tipologi Partisipasi*. Bandung: Bumi Aksara
- Primadany, S.R., Mardiyono & Riyanto. 2013. *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk)*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1 (4): 135-143.
- Rani, D.P.M. 2014. *Pengembangan Potensi Pariwisata Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur (Studi Kasus: Pantai Lombang)*. *Jurnal Politik Muda*, 3 (3): 412-421.
- Riskayana., Adys, A.K., & Taufik, A. 2012. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Pantai Karsut di Desa Kampala Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2 (2): 180-190.
- Sastropoetro. 1995. *Pengertian Parsitifasi*. Surabaya: Bumi Aksara
- Slamet, Y. 2010. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. 11 Maret: University Press. Surakarta.
- Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*.
- Wardiyanto., dan Baiquni. M. 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Bandung: Lubuk Agung.